



**PROGRAM MINAPOLITAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2014**

SKRIPSI

Oleh:

**AJENG NUNGKY CENDRY
NIM 150210302039**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROGRAM MINAPOLITAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2014**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

**AJENG NUNGKY CENDRY
NIM 150210302039**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Ninung Andriyani dan ayahanda tercinta Hadi Purwanto, yang telah memberikan kasih sayang tulus, memberikan do'a, memberikan bimbingan, memberikan semangat dan memberikan segalanya sehingga penulis semangat menjalani hidup dan berusaha mencapai keberhasilan;
2. Guru-guruku terhormat di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3, SDN 7 Sumberberas, MTsN Banyuwangi 2, dan SMAN 1 Purwoharjo;
3. Para Dosen terhormat di Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya;
4. Almamater Universitas Jember, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Sejarah.

MOTTO

“Sukses adalah akibat dari rangkaian sebab yang secara sadar
anda lakukan secara terus-menerus”

(Syafii Efendi)¹



¹Efendi, Syafii. 2017. *My Enemy is Me*. Yogyakarta: Penerbit WR.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

nama : Ajeng Nungky Cendry

NIM : 150210302039

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 November 2019

Yang menyatakan,

Ajeng Nungky Cendry
NIM 150210302039

SKRIPSI

**PROGRAM MINAPOLITAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2014**

Oleh:

AJENG NUNGKY CENDRY
NIM 150210302039

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Marjono, M.Hum.

Dosen Pembimbing Kedua : Dr. Nurul Umamah, M.Pd.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari : Rabu

tanggal : 6 November 2019

tempat : Gedung 1 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP 196004221988021001

Dr. Nurul Umamah, M.Pd
NIP 196902041993032008

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Sumardi, M.Hum.
NIP 196005181989021001

Drs. Sumarjono, M.Si.
NIP 195808231987021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D.
NIP 196808021993031004

RINGKASAN

Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014; Ajeng Nungky Cendry, 150210302039; 2019: xiv+127 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Program minapolitan merupakan konsepsi pengembangan ekonomi pada suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dari hulu ke hilir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kecamatan Muncar telah ditetapkan sebagai zona inti kawasan Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi, dengan kegiatan ekonomi setiap harinya mengandalkan sumber daya kelautan yang turut didukung oleh pabrik-pabrik pengolahan dan pengalengan ikan, sehingga Muncar tidak luput dari agenda modernisasi perikanan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui program minapolitan. Program minapolitan tersebut ditujukan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak penerapan program minapolitan di Kecamatan Muncar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 hingga 2014.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi program minapolitan diterapkan di Kecamatan Muncar tahun 2010?; (2) Bagaimanakah implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar tahun 2010-2014?; dan (3) Bagaimanakah dampak program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar tahun 2010-2014?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah: (1) Heuristik yakni pengumpulan sumber-sumber melalui kegiatan observasi, wawancara dan studi kepustakaan terkait topik penelitian yang dilakukan, (2) Kritik yakni mengkritik sumber dokumen untuk memperoleh keabsahan sumber, dengan dengan menyeleksi secara fisik sumber yang telah diperoleh (kritik ekstern) dan mengkritik sumber wawancara dengan cara membandingkan

informasi dari narasumber satu dengan narasumber yang lainnya (kritik intern), (3) Interpretasi yakni menggabungkan fakta-fakta berupa informasi yang didapat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, (4) Historiografi yakni pemaparan hasil dari interpretasi dengan menuliskan fakta penelitian sejarah yang telah dilaksanakan.

Hasil dari penelitian ini ialah dampak program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar dapat diketahui dari tingkat SDM dan tingkat pendapatan. Program peningkatan SDM yang dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan nelayan dan pemberdayaan UMKM, telah memberikan dampak positif diantaranya yaitu, meningkatnya pengetahuan nelayan tentang cara menangkap ikan berwawasan lingkungan, dan menjadikan para istri nelayan memiliki keterampilan mengolah ikan, sehingga dapat menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi yang kemudian dapat dipasarkan. Jika dilihat dari tingkat pendapatan, implementasi program minapolitan pada tahun 2010 hingga 2013 belum terlihat dampaknya. Namun, pada tahun 2014 mulai terlihat dampaknya karena peningkatan produksi ikan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Disisi lain, pembangunan infrastruktur minapolitan juga telah memberikan dampak positif bagi kelancaran aktivitas para nelayan sehingga turut berpengaruh pula pada tingkat pendapatan nelayan Muncar.

Kesimpulan dalam penelitian ini ialah (1) terdapat empat faktor yang melatarbelakangi penerapan program minapolitan dikawasan Muncar diantaranya terdapat program pemerintah mengenai pelaksanaan minapolitan, letaknya yang geografis, memiliki komoditas unggulan bidang perikanan, dan ketersediaan fasilitas pendukung; (2) Implementasi program minapolitan dikawasan Muncar dilaksanakan melalui tiga kelompok kegiatan yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur, pembagunan perikanan dan program peningkatan SDM; (3) Implementasi program minapolitan telah memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar, diantaranya yaitu meliputi peningkatan SDM dan peningkatatan pendapatan masyarakat nelayan maupun pelaku usaha UMKM selaku masyarakat pesisir kawasan minapolitan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D., selaku rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sekaligus dosen penguji I yang telah berkenan memberikan masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus dosen pembimbing II yang telah yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selama proses penulisan skripsi ini;
5. Drs. Marjono, M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan bimbingan, arahan dan perhatian selama proses penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
6. Drs. Sumarjono, M.Si., selaku dosen penguji II yang telah yang telah berkenan memberikan sebagian waktunya untuk memberikan masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Sugiyanto, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang memberi pengarahan dan saran dari awal kuliah sampai selesai;
8. Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu dan membimbing dari awal semester hingga saat ini;

9. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi baik secara lahir dan batin untuk kelancaran studi saya;
10. Sahabatku Intan Auliyaul M., yang setia dan tulus memberikan motivasi, dukungan, semangat dan meluangkan banyak waktu untuk memberikan kritik maupun saran untuk penulisan skripsi ini;
11. Rizki Ari Subekti, yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini;
12. *Expost Family* yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi untuk saya;
13. Teman-teman Prodi Pendidikan Sejarah tanpa terkecuali, khususnya angkatan 2015 yang telah berjuang bersama dari awal semester hingga saat ini untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan;
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan.

Jember, 6 November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN RINGKASAN	viii
HALAMAN PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. METODE PENELITIAN	17
BAB 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PENERAPAN PROGRAM MINAPOLITAN DI KECAMATAN MUNCAR TAHUN 2010	23
4.1 Program Pemerintah.....	23
4.2 Letak Geografis.....	26
4.3 Memiliki Komoditas Unggulan Bidang Perikanan.....	29
4.4 Ketersediaan Fasilitas Pendukung	32

BAB 5. IMPLEMENTASI PROGRAM MINAPOLITAN DI KECAMATAN MUNCAR TAHUN 2010-2014	39
5.1 Pembangunan Infrastruktur.....	39
5.2 Pembangunan Perikanan.....	46
5.3 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).....	51
BAB 6. DAMPAK PROGRAM MINAPOLITAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN MUNCAR TAHUN 2010-2014	57
6.1 Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM).....	57
6.2 Tingkat Pendapatan.....	62
BAB 7. PENUTUP	67
7.1 Simpulan.....	67
7.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. MATRIKS PENELITIAN.....	76
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA.....	77
LAMPIRAN 3. PETA KABUPATEN BANYUWANGI DAN KECAMATAN MUNCAR.....	80
LAMPIRAN 4. DAFTAR INFORMAN	82
LAMPIRAN 5. HASIL WAWANCARA.....	83
LAMPIRAN 6. FOTO KEGIATAN PENELITIAN	111
LAMPIRAN 7. SURAT KEPUTUSAN	122
LAMPIRAN 8. SURAT IZIN PENELITIAN	125

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program minapolitan merupakan konsepsi pengembangan ekonomi pada suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dari hulu ke hilir, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik masyarakat nelayan, pembudidaya maupun pengolah ikan dengan parameter peningkatan pendapatan (Widjaja, 2013: 17). Dalam penerapannya, program minapolitan dilaksanakan di kawasan pemasok hasil perikanan atau sentra produksi perikanan, kawasan tersebut mampu memberikan kontribusi besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai kawasan yang telah diterapkan program minapolitan, maka kawasan tersebut disebut sebagai kawasan minapolitan (Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam Jamilah dan Mawardati, 2018: 2).

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya (Widjaja, 2013: 10). Kawasan Minapolitan di wilayah Indonesia telah ditetapkan sebanyak 223 Kabupaten/Kota yang sebelumnya hanya berjumlah 197 kawasan Minapolitan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39/MEN/2011). Di wilayah Propinsi Jawa Timur, Menteri telah menetapkan 12 Kawasan Minapolitan, 5 (lima) diantaranya ialah kawasan minapolitan berbasis budidaya perairan yang meliputi kota Blitar, Sumenep, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan, kemudian untuk 7 (tujuh) lainnya ialah kawasan Minapolitan berbasis perikanan tangkap yang meliputi kota Probolinggo, Banyuwangi, Malang, Trenggalek, Pacitan, Tuban, dan Lamongan (Wiadnya, 2011).

Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/852/KEP/429.011/2010, lokasi minapolitan di Banyuwangi terletak di Kecamatan Muncar. Sebagai daerah penghasil utama perikanan, maka Kecamatan Muncar dijadikan sebagai zona inti kawasan

minapolitan yang mempunyai 2 (dua) zona pendukung yaitu Zona Sentra Produksi (Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Pesanggaran) dan Zona Penyangga (Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono dan Kecamatan Tegaldlimo). Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri No. 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap, dengan didasarkan pada ketersediaan dan kesesuaian lahan, kesiapan prasarana, ketersediaan tenaga kerja serta sumber daya lain yang membentuk keunggulan terhadap lokasi minapolitan di Muncar (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 17).

Terpilihnya Kecamatan Muncar sebagai zona inti kawasan minapolitan juga tidak terlepas dari adanya pelabuhan di Kecamatan tersebut yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), yang merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Bagan Siapiapi yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Seperti daerah-daerah sentra produksi perikanan lain yang ada di Indonesia, kegiatan ekonomi di Muncar setiap harinya mengandalkan sumber daya kelautan. Hasil tangkap ikan didukung oleh sekitar 90 unit pabrik pengolahan dan pengalengan ikan, sehingga Muncar tidak luput dari agenda modernisasi perikanan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui program minapolitan (Kamil, Tanpa Tahun).

Program minapolitan salah satunya ditujukan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien serta pengembangan sumberdaya perikanan. Dasar pelaksanaan program minapolitan mengacu pada potensi perikanan dan masalah dalam perikanan tangkap (Jamilah dan Mawardati, 2018: 2). Kecamatan Muncar merupakan kawasan yang potensial dengan sumberdaya perikanan sebesar $\pm 94,81\%$ dari semua produksi penangkapan ikan di laut. Sebagai kawasan yang potensial, kawasan Muncar juga terdapat permasalahan dalam upaya penangkapan ikan, diantaranya yaitu masih banyak terjadi kasus tindak pelanggaran dalam mengeksploitasi sumberdaya perairan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2010: 18). Disisi lain, pengalaman menunjukkan bahwa pada kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan pada umumnya untuk kawasan pedesaan lambat berkembang karena kurang tersedianya sarana prasarana dan

fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga relatif rendah jika dibandingkan dengan sumber daya manusia yang ada dipertanian. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan untuk nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di pertanian. Dengan konsep minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harapannya dapat dipercepat agar kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya terdapat dipertanian dapat dikembangkan di pedesaan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18/MEN/2011). Sehingga, pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, program minapolitan yang telah dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan diupayakan dapat mengatasi masalah perikanan di wilayah Muncar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan.

Pada implementasinya, program minapolitan tidak selalu harus dimulai dari awal karena Kecamatan Muncar merupakan daerah kawasan minapolitan dengan sistem ekonomi yang sudah berkembang dengan baik (Wiadnya, 2011). Meskipun demikian, pengembangan kawasan minapolitan juga diperlukan guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Apabila kawasan sudah berkembang, dukungan pengetahuan dalam bidang perikanan juga sangat penting. Sehingga program minapolitan dapat mencapai tujuannya dan dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar selaku masyarakat pesisir yang mendapatkan pengaruh langsung dari penerapan program minapolitan. Dampak sosial ekonomi yaitu meliputi tingkat sumber daya manusia (SDM) dan tingkat pendapatan masyarakat nelayan Muncar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terkait penerapan program minapolitan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penulis perlu melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam penerapan program minapolitan dapat memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, atau justru berdampak sebaliknya. Pengkajian dalam penelitian ini akan menitik beratkan pada faktor-faktor yang melatar belakangi diterapkannya program minapolitan di Kecamatan Muncar, implementasi program minapolitan serta

pengaruhnya bagi masyarakat nelayan Muncar dengan judul “Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014”.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami judul penelitian “Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014”.

Program minapolitan merupakan konsepsi pengembangan ekonomi pada suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dari hulu ke hilir, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik masyarakat nelayan, pembudidaya maupun pengolah ikan dengan parameter peningkatan pendapatan (Widjaja, 2013: 17). Menurut Jamilah dan Mawardati (2018: 2) program minapolitan salah satunya ditunjukkan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien serta pengembangan sumberdaya perikanan, dasar pelaksanaannya mengacu pada potensi perikanan dan masalah dalam perikanan tangkap. Program minapolitan dalam penegasan judul ini adalah program minapolitan berbasis perikanan tangkap yang diterapkan di Kecamatan Muncar.

Dampak menurut Gorys Keraf dalam Soemarwoto (dalam Syahdan, 2018: 3) adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan positif maupun negatif. Sedangkan menurut Soemarwoto (dalam Syahdan, 2018: 3), menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia. Sehingga “dampak” dapat dikatakan sebagai suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Pengaruh dalam hal ini ialah pengaruh implementasi program minapolitan yang berakibat terhadap kondisi sosial ekonomi pada masyarakat nelayan Muncar.

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki (Abdulsyani dalam Oktama 2013: 9). Berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji, maksud dari kondisi sosial dalam penegasan judul ini yaitu mengenai tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat nelayan Muncar, sedangkan kondisi ekonomi yaitu terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat nelayan Muncar tahun 2010 - 2014.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan kegiatan penangkapan maupun membudidayakan ikan. Pada umumnya mereka tinggal diwilayah pesisir pantai, sehingga dekat dengan lokasi kegiatannya sehari-hari (Mulyadi, 2005: 7). Nelayan yang dimaksudkan dalam penelitian ialah para nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) di kawasan Muncar, kelompok KUB nelayan tersebut merupakan sebuah kelompok nelayan yang menjadi sasaran dari implementasi kegiatan program minapolitan.

Jadi maksud dari penegasan judul “Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014” ialah penerapan program pengembangan ekonomi pada wilayah pesisir. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Muncar, melalui kegiatan pembagunan perikanan, pembangunan infrastruktur, dan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada implementasinya, program tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat pendapatan masyarakat nelayan Muncar tahun 2010 hingga 2014.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar terfokus pada kajian penelitian yang akan dibahas. Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup materi.

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena Kecamatan Muncar memiliki Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) terbesar kedua setelah Bagan Siapiapi yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Banyuwangi. Kecamatan Muncar telah ditetapkan sebagai zona inti kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pemilihan lokasi tersebut sebagai lingkup spasial penelitian ini di dasarkan pada lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan untuk mencari informasi secara langsung dalam kegiatan penelitian.

Lingkup temporal dalam penelitian ini ialah tahun 2010 sampai 2014. Diawali pada tahun 2010 karena berdasarkan pada Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/852/KEP/429.011/2010 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan, Kecamatan Muncar sebagai zona inti kawasan minapolitan dengan 2 zona pendukung yaitu Zona Sentra Produksi meliputi wilayah Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Pesanggaran, dan Zona Penyangga meliputi wilayah Kecamatan Srono dan Kecamatan Tegaldlimo. Sedangkan peneliti memilih batas akhir tahun 2014 didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2010 tentang penetapan lokasi minapolitan, bahwa program minapolitan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hal tersebut berkaitan dengan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu “Indonesia Menjadi Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”, sehingga program minapolitan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan mencapai misi tersebut.

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi program minapolitan diterapkan di Kecamatan Muncar Tahun 2010, implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar Tahun 2010-2014, dan dampak program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2014.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi program minapolitan diterapkan di Kecamatan Muncar tahun 2010?
2. Bagaimanakah implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar tahun 2010-2014?
3. Bagaimanakah dampakprogram minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar tahun 2010-2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji faktor yang melatarbelakangi diterapkannya program minapolitan di Kecamatan Muncar tahun 2010.
2. Untuk mengkaji implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar tahun 2010-2014.
3. Untuk mengkaji dampak program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar tahun 2010-2014.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, yakni:

1. bagi penulis, sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian.
2. bagi Prodi Pendidikan Sejarah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana sumber belajar bagi mahasiswa yang ingin mengkaji tentang Sejarah Sosial Ekonomi masyarakat nelayan.
3. bagi peneliti lain, sebagai kajian lanjutan dan sumber wawasan untuk mendukung penelitian dengan topik yang serupa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian yang sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Abdurahman, 2007: 61). Penulis telah mendapat beberapa penelitian terdahulu yang akan di-*review*, baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi.

Skripsi “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015” yang ditulis oleh Purwati (2016) merupakan penelitian dengan menggunakan teori modernisasi yang fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern dengan melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya. Skripsi ini berisi tentang kehidupan masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo, menjelang tahun 2000 kehidupannya sangat sederhana terlihat dari alat penangkapan ikan yang digunakan menggunakan alat yang masih tradisional dengan hasil pendapatan yang tidak setara dengan kekayaan sumberdaya laut yang ada. Minimnya hasil pendapatan yang diperoleh menjadikan ekonomi para nelayan Desa Kedungrejo berada pada posisi paling bawah. Rendahnya minat para nelayan untuk mengenyam pendidikan membuat pemahaman ilmu yang dimiliki jauh tertinggal khususnya dalam pengembangan teknologi alat tangkap, sehingga untuk melakukan kegiatan menangkap ikan, para nelayan Kedungrejo hanya belajar dari pengalaman yang telah mereka lakukan selama ini. Dari hasil penelitian skripsi ini juga dipaparkan bahwa perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan desa kedungrejo terjadi karena disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor eksteren. Faktor intern disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang membuat semakin banyak pula kebutuhan ekonomi dan biaya untuk pendidikan, sehingga membuat nelayan berkerja ganda untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk faktor ekstern disebabkan adanya kebijakan pemerintah dan teknologi penangkap ikan modern yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Kedungrejo yaitu,

masyarakat mulai bisa meningkatkan kesejahteraan yang meliputi aspek kehidupan seperti tempat tinggal, pendidikan dan pendapatan yang meningkat.

Dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap telah dilakukan dengan cara yang lebih modern, pengolahan juga dilakukan dengan cara pengoptimalan hasil tangkapan ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Meskipun memiliki kesamaan dalam meneliti tentang sosial ekonomi masyarakat nelayan daerah Kecamatan Muncar, namun pada penelitian terdahulu ini lebih fokus pada perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo yang diawali pada tahun 2000 sejak awal dimulainya Otonomi Daerah yang berimplikasi terhadap kebijakan sektor perikanan laut, sehingga penulis mencari sisi lain dengan mengkaji program minapolitan dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar yang dimulai sejak tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/852/KEP/429.011/2010 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi, yang akan dikaji hingga tahun 2014.

Penelitian yang berjudul “Strategi Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)” oleh Khamarullah, Gani dan Riyanto (2014). Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang berisi tentang pengembangan kawasan minapolitan melalui Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Muncar, khususnya pada bidang budidaya perikanan sebagai wujud nyata terselenggaranya pembangunan perekonomian masyarakat yang merata. pada tahun 2011 jumlah UMKM sebanyak 55,2 juta dengan tenaga kerja sebanyak 104,6 juta jiwa, namun UMKM mengalami berbagai macam hambatan yaitu mainset pembudidaya yang masih belum mengelola usahanya secara profesional, rendahnya SDM, dan kurangnya modal yang berdampak pada lambatnya pengembangan usaha. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi berupaya mengembangkan UMKM berbasis minapolitan melalui tiga strategi utama yaitu pemberdayaan Sumber daya Manusia (SDM), pemberian bantuan modal dan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI). Ketiga strategi tersebut telah berjalan dengan baik, akan tetapi pencapaian pemberdayaan

SDM belum optimal karena minimnya jumlah tenaga lapang yang memberikan pelatihan. Strategi pengembangan UMKM berbasis minapolitan di Kecamatan Muncar telah memberikan dampak positif yaitu meningkatnya perekonomian pembudidaya sehingga mempengaruhi hasil pendapatan pembudidaya. Selain itu, perekonomian masyarakat sekitar lingkungan usaha budidaya juga turut mengalami peningkatan karena mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi pekerja di tempat usaha budidaya tersebut. Pada penelitian terdahulu ini, memiliki persamaan terkait pembahasan program minapolitan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Muncar, namun terkait dampak program minapolitan dalam penelitian ini lebih mengarah pada pengembangan usaha dan belum memaparkan tentang minapolitan perikanan tangkap, oleh karena itu penelitian ini akan lebih memfokuskan penelitian pada program minapolitan berbasis perikanan tangkap dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar pada tahun 2010-2014.

Penelitian skripsi “Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Dampaknya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pelabuhan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan 2010-2014” yang ditulis oleh Sa’adah (2015) menghasilkan temuan bahwa Pelabuhan Perikanan Brondong merupakan zona inti kawasan minapolitan karena status Pelabuhan Perikanan Nusantara atau disebut juga pelabuhan tipe B dan memiliki fasilitas yang cukup memadai sebagai penunjang dalam kegiatan perikanan. Lingkup temporal penelitian terdahulu ini Brondong dijadikan sebagai kawasan minapolitan, sedangkan tahun 2014 dijadikan sebagai batasan akhir dengan pertimbangan bahwa batasan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) yaitu pada tahun 2014 oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Penetapan kawasan minapolitan di Pelabuhan Perikanan Brondong yang telah diputuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah sesuai dengan prinsip dalam pengembangan kawasan karena sebagian besar masyarakat Brondong bermatapencaharian sebagai nelayan, selain itu juga didukung dengan adanya berbagai jenis usaha industri pengolahan hasil perikanan. Dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa di daerah Brondong banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya

pengembangan kawasan minapolitan karena kurangnya pengadaan sosialisasi sehingga partisipasi masyarakat dalam mengembangkan program minapolitan masih sangat rendah. Tujuan dari pengembangan kawasan minapolitan sudah terealisasi, terbukti dengan hasil produksi ikan yang terus mengalami peningkatan dan pendapatan nelayan juga semakin meningkat. Kehidupan ekonomi nelayan menjadi lebih sejahtera dan istri nelayan juga berperan penting dalam menjaga perekonomian keluarga, akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat masih rendah karena banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan tinjauan pustaka karena memiliki kesaamaan dengan topik penelitian yang penulis kaji. Keberhasilan program minapolitan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan lingkup spasial yang berbeda yaitu di Kecamatan Muncar untuk mengetahui apakah dalam penerapannya juga mengalami keberhasilan seperti program minapolitan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

Penelitian Hijriani (2018) dengan judul “Program Minapolitan pada Perkembangan Perikanan Tambak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2015”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi 4 tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Program minapolitan dalam penelitian ini berbasis budidaya perikanan tambak dengan komoditas unggulan yaitu udang dan bandeng. Sebelum diterapkannya program minapolitan produksi budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 sampai 2010 mengalami peningkatan dalam produksinya, akan tetapi pada tahun 2005 ke 2006 mengalami penurunan karena faktor penyakit pada ikan dan kondisi lingkungan sekitar tambak yang mempengaruhi kondisi air. Namun setelah di terapkannya program minapolitan, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 hasil produksi mengalami kenaikan yang sangat besar, karena pemerintah pusat dalam hal ini turut memberikan perhatian yang cukup besar. Pemilik tambak di Sidoarjo dilihat dari segi sosial, petani tambak dapat dilihat dengan status sosial. Status sosial dapat dilihat dari tingkat Pendidikan dilingkungan masyarakat, semakin tinggi pendidikan maka semakin banyak yang menghormati khususnya dikalangan

pedesaan. Perikanan tambak berkontribusi besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat Sidoarjo, keuntungan yang didapat cukup besar, hal ini didasarkan pada produksi yang dapat dihasilkan setiap tahunnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang serupa dengan yang akan peneliti kaji, yang membedakan ialah fokus pada kajiannya. Penelitian terdahulu ini fokus penelitiannya yaitu pada kawasan minapolitan berbasis perikanan tambak di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pada penelitian yang akan penulis kaji yaitu minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kecamatan Muncar. Penerapan program minapolitan berbasis perikanan tambak di Sidoarjo telah membawa keberhasilan dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar, hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dampak program minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kecamatan Muncar, untuk mengetahui apakah dalam penerapannya program minapolitan berbasis perikanan tangkap di wilayah Muncar juga memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat nelayan seperti di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian yang ditulis oleh Yagus (2015) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau”, merupakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan minapolitan telah berjalan sesuai dengan program diantaranya pemberian bantuan berupa pembuatan kolam ikan, bantuan bibit ikan, bantuan pemberian dana hibah, pembuatan akses jalan menuju minapolitan serta program kebijakan lain untuk mendukung para petani dan pebisnis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan kawasan minapolitan di Desa Malinau Seberang juga berkontribusi positif terhadap tingkat pendapatan masyarakat dan para petani ikan dapat merasakan langsung manfaatnya. Dalam penelitian ini juga menjelaskan faktor yang mendukung dilaksanakannya pengembangan kawasan minapolitan bagi petani ikan, yaitu dibukanya akses jalan menuju kawasan minapolitan yang memadai, fasilitas seperti jaringan listrik, air bersih serta tersedianya industri pengolahan perikanan yang mendukung pengembangan usaha minapolitan. Penulis memilih jurnal penelitian ini sebagai bahan tinjauan pustaka karena memiliki kesamaan dengan

topik penelitian yang akan dikaji yaitu tentang program minapolitan. Akan tetapi terdapat perbedaan, pada penelitian terdahulu minapolitan yang dibahas berbasis perikanan budidaya, sedangkan yang akan penulis kaji yaitu berbasis perikanan tangkap. Penerapan program minapolitan di Desa Malinau Seberang telah memberikan kontribusi positif terhadap tingkat pendapatan petani ikan di Desa Malinau Seberang, hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang penerapan program minapolitan di Kecamatan Muncar untuk mengetahui apakah program tersebut juga memberikan kontribusi positif terhadap tingkat pendapatan masyarakat nelayan Muncar.

Jamilah dan Mawardati (2018) dalam karyanya yang berjudul “Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan” merupakan buku yang memaparkan hasil penelitian tentang program pengembangan kawasan minapolitan yang berdampak positif bagi permasalahan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur. Jamilah dan Mawardati menjelaskan bahwa perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi untuk dikembangkan karena sumberdaya perikanan yang ada di daerah tersebut sangat melimpah, namun sumberdaya yang tersedia belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Hal tersebut, terlihat dari tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Timur. Penyebab terjadinya kemiskinan pada sebagian besar masyarakat nelayan, terutama nelayan lokal ialah keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan dalam penguasaan teknologi penangkapan, keterbatasan akses ke sumber permodalan seperti bank, serta rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan para nelayan. Pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan guna memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dengan mengembangkan kawasan berbasis ekonomi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Dalam pelaksanaannya, program minapolitan telah memberikan dampak positif bagi kondisi perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan beberapa capaian diantaranya peningkatan infrastruktur kawasan minapolitan, peningkatan produksi perikanan tangkap, penyerapan tenaga kerja, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan usaha perikanan tangkap, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber

Daya Manusia (SDM), serta peningkatan pada permodalan dan investasi. Penulis memilih buku ini untuk dijadikan sebagai tinjauan pustaka karena buku ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang penerapan program minapolitan dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan hasil pendapatan nelayan di Kabupaten Aceh Timur. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan tentang program minapolitan dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, sehingga penulis ingin mengkaji apakah dalam penerapan program minapolitan di wilayah Kecamatan Muncar juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan seperti di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan kajian penelitian diatas, beberapa penelitian telah ada yang mengkaji tentang penerapan program minapolitan dan dampaknya bagi masyarakat sekitar, namun untuk penelitian tentang program minapolitan di wilayah Kecamatan Muncar hanya memfokuskan kajiannya pada minapolitan berbasis usaha sehingga posisi penulis dalam hal ini ialah mengembangkan kajian penelitian yang telah ada. Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang strategi dan dampak pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis minapolitan di Kecamatan Muncar, sedangkan penulis akan menekankan pembahasan tentang penerapan program minapolitan dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Ekonomi. Sosiologi ekonomi merupakan studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara yang dimaksudkan dalam hal ini berkaitan dengan semua aktivitas masyarakat yang ada hubungannya dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa dan barang (Sukidin, 2007: 10). Pendekatan sosiologi ekonomi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak program minapolitan terhadap kehidupan sosial yang tidak meninggalkan peran ekonomi pada masyarakat nelayan Kecamatan Muncar.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan Publik oleh Ripley (1985). Pada teori ini terdapat lima tahapan yang meliputi penyusunan

agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, dan kebijakan baru (Taufiqurakhman, 2014: 19). Namun, implementasi teori dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap keempat. Untuk lebih jelasnya, akan penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda. Pada tahap ini terdapat kegiatan yang perlu dilakukan yakni membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, sehingga masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Jadi, pada tahap ini peneliti akan melihat suatu fenomena atau permasalahan penting yang terjadi di Kecamatan Muncar, kemudian fenomena atau permasalahan tersebut masuk dalam agenda pemerintah untuk dibuatkan suatu kebijakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan.
- 2) Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, yang kemudian sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Jadi, dalam tahap ini peneliti akan mengetahui bahwa terdapat suatu program yaitu minapolitan, yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 3) Tahap implementasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang dalam implementasinya dilaksanakan secara intensif agar dapat berjalan dengan baik. Jadi, pada tahap ini peneliti akan menganalisis implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar untuk mengetahui program-program apa saja yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2010 hingga 2014.
- 4) Tahap evaluasi terhadap implementasi. Pada tahap ini, dari implementasi kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Jadi, pada tahap ini peneliti akan menganalisis dampak implementasi program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Muncar pada tahun 2010 hingga 2014.

Dengan menggunakan teori ini, penulis akan mengkaji tentang dampak penerapan program minapolitan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mengetahui dampak program tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar, selaku masyarakat pesisir sekitar kawasan minapolitan di Kecamatan Muncar.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah ialah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masalampau, rekonstruksi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut dengan historiografi (Gottschalk, 1985: 32). Adapun prosedur dalam penelitian sejarah meliputi empat tahap antara lain: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Tahap pertama dalam prosedur penelitian sejarah ialah heuristik atau yang biasa disebut teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah (Abdurahman, 2007: 64). Pada tahap ini penulis mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan dampak penerapan program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan penulis dengan cara melaksanakan kegiatan pengamatan secara langsung di kawasan minapolitan Kecamatan Muncar serta terjun langsung ke masyarakat nelayan Muncar. Dalam pelaksanaannya penulis juga melakukan kegiatan dokumentasi terhadap objek yang berkaitan dengan implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar. Untuk melengkapi dokumentasi yang telah didapat peneliti melakukan pencatatan dalam bentuk catatan lapang. Kegiatan observasi bertujuan memudahkan penulis dalam mendapatkan sumber untuk menjawab permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

Kegiatan wawancara dilakukan penulis untuk memperoleh informasi terkait permasalahan dalam penelitian yang dikaji. Sebelum melaksanakan kegiatan wawancara penulis merumuskan beberapa pertanyaan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, penulis juga menyiapkan alat perekam dan buku catatan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan beberapa pihak narasumber, yaitu dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi penulis melakukan

wawancara dengan Bapak Widi, Bapak Anang, dan Bapak Edi. Adapun narasumber dari UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar yaitu Ibu Rini dan Bapak Umar. Kemudian untuk narasumber masyarakat nelayan pesisir Muncar penulis melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Hasan selaku ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Bapak Paiman, Bapak Riyaman, Bapak Heriyanto, Ibu Astutik, dan Ibu Komariah.

Selanjutnya, studi pustaka dilakukan penulis untuk mencari dokumen dan sumber-sumber tertulis yang relevan. Untuk sumber buku, penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi dan artikel, diperoleh dari internet, perpustakaan dan koleksi pribadi penulis. Sedangkan untuk dokumen arsip penting diperoleh dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi serta UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar.

Dari berbagai sumber yang diperoleh penulis membagi sumber-sumber tersebut menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini merupakan sumber yang didapat dari hasil penelitian berupa perolehan data-data, observasi dan wawancara kepada pihak Dinas Perikanan dan Pangan, UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar, dan masyarakat nelayan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Dikatakan sumber primer karena narasumber sebagai saksi yang hidup sejaman pada peristiwa tersebut, hadir sebagai pelaku yang menyaksikan secara langsung serta mengetahui penerapan program minapolitan dan kondisi masyarakat nelayan Muncar (Gottschalk, 1985: 35). Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka berupa buku-buku, penelitian terdahulu dan artikel yang relevan seperti buku Jamilah dan Mawardati (2018) berjudul "*Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan*", Mulyadi (2005) berjudul "*Ekonomi Kelautan*", Widjaja (2013) berjudul "*Pengembangan Kawasan Minapolitan*", Hijriani (2018) berjudul "*Program Minapolitan pada Perkembangan Perikanan Tambak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2015*", Khamarullah (Tanpa Tahun) berjudul "*Strategi Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi*

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi”, Purwati (2016) berjudul “*Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015*”, Sa’adah (2015) “*Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Dampaknya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan 2010-2014*”, Yagus (2015) berjudul “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau*”, Aliyubi (2015) berjudul “*Analisis Perbedaan Hasil Tangkapan Berdasarkan Warna Lampu pada Alat Tangkap Bagan Apung dan Bagan Tancap di Perairan Muncar, Kabupaten Banyuwangi*”, Kamil (Tanpa Tahun) berjudul “*Revolusi Biru dan Human Security Nelayan di Muncar Banyuwangi*”, Wiadnya (2011) berjudul “*Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah*”, Umar (2013) berjudul “*Analisis Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap (Studi Kasus Pesisir Perikanan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*”. Penulis memperoleh sumber sekunder dari UPT Perpustakaan Universitas Jember, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej, dan koleksi pribadi penulis.

Tahap kedua dalam penelitian ini ialah kritik. Setelah penulis menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber, kegiatan selanjutnya yaitu melakukan kritik terhadap data yang diperoleh baik dalam bentuk tulisan maupun lisan untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam tahap ini, penulis melakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber dengan melakukan dua tahap kritik yaitu kritik ekstern dan kritik intern (Abdurahman, 2007: 68). Pada kegiatan kritik ekstern untuk sumber dokumen penulis melakukan pengujian atas keaslian sumber dengan menyeleksi secara fisik sumber yang telah diperoleh, menyelidiki jenis kertas, tinta dan gaya tulisan yang digunakan. Selain itu, penulis juga menyelidiki tahun pembuatan sehingga sumber tersebut dapat dipastikan autentitasnya.

Selanjutnya yaitu kritik intern, pada tahap ini penulis melakukan penilaian terhadap kesahihan sumber yang diperoleh. Kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah tidaknya bukti atau fakta sejarah (Abdurahman,

2007: 70). Kritik intern dilakukan untuk sumber wawancara, dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber satu dengan narasumber yang lainnya untuk mengetahui bahwa informasi yang disampaikan adalah sebuah fakta. Dengan demikian, kegiatan kritik intern dapat menghasilkan fakta yang benar-benar terbukti kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik intern untuk dokumen atau buku dilakukan penulis dengan cara memahami maksud dari kesaksian penulis dalam dokumen atau buku tersebut, sehingga penulis dapat mengetahui dan memahami isi sumber dokumen atau buku yang digunakan.

Tahap ketiga dalam metode penelitian ini ialah interpretasi. Setelah penulis berhasil menemukan fakta dari hasil kritik ekstern dan kritik intern, kegiatan selanjutnya yaitu menggabungkan fakta-fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut dilakukan karena fakta hasil dari kritik ekstern dan kritik intern sifatnya masih berdiri sendiri, sehingga perlu diinterpretasikan supaya dapat menjadi sebuah cerita yang memiliki kesesuaian dengan peristiwa sesungguhnya. Penggabungan fakta dilakukan dengan menafsirkan secara sistematis, rasional, logis dan kronologis sehingga membentuk kisah sejarah yang mudah dimengerti. Kegiatan penulis pada tahap ini yaitu melakukan penafsiran terhadap *Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi* dengan menghubungkan makna dari fakta-fakta yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan kemudian dirangkai secara kronologis dengan aspek sebagai berikut: (1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi program minapolitan diterapkannya di Kecamatan Muncar tahun 2010; (2) Implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar tahun 2010-2014; (3) Dampak program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar tahun 2010-2014.

Tahap keempat ialah historiografi, yang merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Dalam tahap ini peneliti melakukan kegiatan penulisan dengan memberikan pemaparan atau pelaporan terkait hasil penelitian sejarah yang telah dilaksanakan (Abdurahman, 2007: 76). Penyajian hasil penelitian ini adalah bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan sistematika penulisan yang

terdiri dari tujuh bab serta dirangkai secara kronologis sehingga menghasilkan karya sejarah yang mudah dipahami.

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab. Bab 1 yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada latar belakang berisi tentang alasan penulis melakukan penelitian ini, dengan mengungkapkan alasan secara objektif dan subjektif. Selain itu, peneliti juga menguraikan ungkapan permasalahan yang menarik, sehingga penting untuk diteliti. Kemudian untuk penegasan judul, berisi tentang definisi konseptual maupun operasional dari judul penelitian ini yang meliputi definisi “Program Minapolitan”, “Dampak”, “Sosial Ekonomi”, dan “Masyarakat Nelayan”, kemudian definisi tersebut disimpulkan guna memfokuskan kajian penelitian ini. Penegasan judul juga dimaksudkan untuk menghindari perbedaan persepsi dalam mengartikan judul penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini berisi tentang pertanyaan terkait permasalahan yang akan dikaji, yaitu tentang faktor-faktor yang melatar belakangi program minapolitan diterapkan di Kecamatan Muncar tahun 2010, implementasi program minapolitan tahun 2010-2014, serta dampak setelah diterapkannya program minapolitan tahun 2010-2014. Selanjutnya, uraian tentang sub bab tujuan dan manfaat penelitian dalam kajian skripsi ini.

Bab 2 yaitu tinjauan pustaka, berisi tentang kajian-kajian penelitian terdahulu berupa buku, skripsi maupun jurnal penelitian yang serupa dan relevan dengan topik penelitian yang akan penulis kaji, kemudian diuraikan pula alasan penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan tinjauan pustaka. Dalam bab tinjauan pustaka juga diuraikan posisi penulis dalam penelitian ini, serta pendekatan dan teori yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk bab 3 yaitu metode penelitian, berisi tentang prosedur metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah yang meliputi 4 tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada masing-masing tahap diuraikan secara aplikatif, mulai dari kegiatan pengumpulan sumber hingga berbentuk sebuah karya tulis sejarah yang disusun secara kronologis.

Bab 4 berisi tentang pemaparan faktor-faktor yang melatarbelakangi program minapolitan diterapkan di Kecamatan Muncar pada tahun 2010. Pada bab ini dijelaskan mengenai kondisi kawasan Muncar menjelang tahun 2010, yaitu mengenai program pemerintah dan kondisi sebelum diterapkannya program minapolitan. Selain itu, dijelaskan pula faktor-faktor yang menjadi pendukung Kecamatan Muncar ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan, yaitu meliputi letaknya yang geografis, memiliki komoditas unggulan bidang perikanan, dan ketersediaan fasilitas pendukung.

Bab 5 memaparkan tentang implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar pada tahun 2010-2014. Implementasi program minapolitan yang dipaparkan, yaitu mengacu pada matrik program tahunan kegiatan minapolitan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam matrik program tahunan tersebut, disebutkan bahwa implementasi program minapolitan memiliki tiga kelompok kegiatan, yaitu meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur, pembangunan perikanan, dan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga kelompok kegiatan minapolitan tersebut, kemudian penulis paparkan menjadi tiga sub bab dan pada masing-masing sub bab dijelaskan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bab 6 menguraikan tentang dampak setelah diterapkan program minapolitan. Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang dampak penerapan program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar pada tahun 2010-2014. Dampak tersebut meliputi tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat nelayan dan tingkat pendapatan masyarakat nelayan Muncar. Selanjutnya bab 7 yaitu penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atau pemaparan jawaban dari rumusan masalah, dan saran dari penulis.

BAB 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PENERAPANAN PROGRAM MINAPOLITAN DI KECAMATAN MUNCAR TAHUN 2010

Kecamatan Muncar merupakan lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/852/KEP/429.011/2010 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan, Muncar telah ditetapkan sebagai zona inti kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap, tepatnya yaitu pada tanggal 2 Agustus 2010. Sebagai daerah kawasan minapolitan, tentunya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diterapkannya program minapolitan di wilayah Kecamatan Muncar, diantaranya yaitu mengenai program pemerintah, letaknya yang geografis, memiliki komoditas unggulan dibidang perikanan, dan ketersediaan fasilitas pendukung.

4.1 Program Pemerintah

Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, dan berkualitas dan percepatan. Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu: (1) kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan; (2) memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi; (3) letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan; (4) terdapat unit produksi, pengolahan, pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah maupun memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan dan pemasaran yang saling terkait; (5) tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana

produksi, pengolahan dan pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluh dan pelatihan; (6) kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan lokasi di masa depan; (7) komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan; (8) ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/MEN/2010).

Berdasarkan persyaratan kawasan minapolitan diatas, guna mengembangkan kegiatan terpadu pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsep minapolitan, maka dilakukan penetapan kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan yang telah tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, telah disebutkan bahwa Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Pusat pelaksanaan kegiatan minapolitan di Kabupaten Banyuwangi berada di Kecamatan Muncar, yang merupakan zona inti kawasan minapolitan.

Program minapolitan pada pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. Pedoman umum minapolitan merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program minapolitan. Sehingga dengan pedoman umum minapolitan tersebut maka nantinya akan menyamakan persepsi mengenai sistem pembangunan sektor kelautan dan Perikanan dengan konsep minapolitan, serta dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembangan minapolitan dan percepatan peningkatan produksi kelautan dan perikanan sesuai tujuan minapolitan. Adapun tujuan pelaksanaan minapolitan diantaranya yaitu: (1) meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; (2) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata;

(3) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan, dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu pengembangan minapolitan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan. Pada implementasinya, konsep minapolitan tidak harus didahului dengan penetapan kawasan minapolitan, tetapi diawali dengan pengembangan sentra produksi dengan paket-paket kebijakan yang mendorong peningkatan produksi, sesuai dengan konsep minapolitan. Paket-paket kegiatan peningkatan produksi dilaksanakan secara nasional, sedangkan khusus untuk kawasan minapolitan paket-paket kebijakan di sesuaikan dengan karakteristik kawasan yang bersangkutan.

Peningkatan produksi di bidang perikanan tangkap, berdasarkan Keputusan Menteri nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman umum minapolitan dilaksanakan dengan sasaran yaitu: (1) pelabuhan perikanan TPI menjadi sentra produksi yang pro nelayan, pendaratan, perdagangan dan distribusi hasil penangkapan ikan yang mampu menggerakkan ekonomi nelayan; (2) wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang potensial dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dengan produktivitas dan kualitas tinggi pro nelayan. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya yaitu (1) menetapkan pelabuhan perikanan dan TPI unggulan sebagai sentra produksi binaan; (2) meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap sumberdaya alam dengan memperluas hak-hak pemanfaatan dan perlindungannya; (3) revitalisasi sarana yang meliputi sarana tempat pendaratan ikan, pelelangan, *cold storage*, dan pabrik es; (4) revitalisasi prasarana yaitu seperti jalan, air bersih dan listrik; (5) memberikan bantuan teknis dan permodalan, dengan menghadirkan lembaga keuangan, pusat penjualan sarana produksi, BBM dan logistik murah dikawasan pelabuhan dan TPI; (6) mengembangkan sistem manajemen pelabuhan yang efisien, bersih, dan sehat; (7) menertibkan pungutan-pungutan dan retribusi yang memberatkan masyarakat; (8) restrukturisasi armada, wilayah penangkapan ikan, serta perijinan; (9) pengkayaan

stok ikan sebagai penyangga produksi; (10) pengembangan alat penangkapan ikan yang produktif dan tidak merusak; (11) mengembangkan investasi perikanan tangkap secara terpadu.

Selanjutnya, untuk pengembangan kawasan minapolitan dilaksanakan guna mempercepat dan meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kawasan minapolitan dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan paket-paket kebijakan lintas sektor dan daerah. Kawasan minapolitan dapat berbasis Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan, ataupun kombinasi dari ketiga bidang tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan karakteristik bidang yang bersangkutan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/MEN/2010). Dengan demikian, di kawasan Muncar pelaksanaan program minapolitan telah tertuang dalam matrik program tahunan kegiatan minapolitan berbasis perikanan tangkap yang dilaksanakan pada tahun 2012 hingga 2014. Kegiatan minapolitan perikanan tangkap telah disesuaikan dengan karakteristik bidang pengembangannya dengan memiliki tiga kelompok kegiatan, diantaranya yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan perikanan, dan program peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).

4.2 Letak Geografis

Letak geografis yang dimaksudkan dalam hal ini ialah, lokasi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, yang meliputi kemudahan infrastruktur jalan, mempunyai akses terhadap pengadaan bahan baku, pengolahan dan pemasaran, kaya sumberdaya alam, memiliki tempat pendaratan ikan, dan lokasinya dekat dengan *fishing ground* (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.18/MEN/2011).

Kecamatan Muncar, secara astronomis terletak di Selat Bali tepatnya pada posisi koordinat $08^{\circ}10' - 08^{\circ}50'$ LS atau $114^{\circ}15' - 115^{\circ}15'$ BT yang memiliki teluk yaitu bernama Teluk Pangpang, dengan luas wilayah sebesar 146.707 Ha dan panjang pantai kurang lebih 13 km serta memiliki tempat pendaratan ikan sepanjang 4,5 km. (Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, 2009: 1). Lokasi

Kecamatan Muncar sangat strategis dengan didukung kemudahan akses jalan. Akses jalan utama di Kecamatan Muncar pada dasarnya berbentuk grid, dengan memiliki jaringan jalan kolektor primer dan sekunder. Untuk jaringan jalan kolektor primer yaitu menghubungkan Kecamatan Muncar dengan Kecamatan Srono dan Kecamatan Tegaldlimo. Sedangkan jaringan jalan kolektor sekunder menghubungkan pusat desa menuju Instalasi Kota Kecamatan (IKK) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar. Jalan kolektor sekunder yang menghubungkan kota dengan PPP Muncar memiliki lebar 7 meter dengan perkerasan aspal. Namun, jalan dengan perkerasan aspal tersebut kondisinya kurang baik, karena ada beberapa bagian jalan yang sudah rusak dan berlubang. Meskipun demikian, akses jalan menuju pelabuhan masih dapat dijangkau dengan mudah menggunakan alat transportasi darat, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 47).

Kecamatan Muncar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang terkenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi posisi Kecamatan Muncar sebelah utara yaitu berbatasan dengan Kecamatan Rogojampi, sebelah selatan Kecamatan Tegaldlimo, sebelah timur Selat Bali, dan sebelah barat yaitu Kecamatan Cluring dan Srono (lihat lampiran 3.1a). Perbatasan Muncar dengan Selat Bali, menjadikan wilayah ini sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan laut terbesar di Kabupaten Banyuwangi karena perairan selat Bali memiliki luas areal kurang lebih 960 mil² dengan potensi penangkapan maksimum lestari untuk sumberdaya perikanan yang dominan yaitu lemuru (*Sardinella Lemuru*) sebesar 46.400 ton per tahun dan untuk Muncar sebesar 25.256 ton per tahunnya. Kegiatan perikanan laut di Kecamatan Muncar sangat berkembang, terutama di daerah pantai Muncar yang telah didukung oleh adanya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) terbesar kedua di Indonesia setelah Bagan Siapiapi. Berdasarkan perkembangan hasil produksi perikanan tahun 2009, usaha penangkapan ikan menjadi cabang usaha terbesar yang mampu memberikan pemasukan yaitu sekitar 89,71%. Hasil produksi perikanan yang paling

mendominasi berasal dari Kecamatan Muncar yaitu sebesar $\pm 94,03\%$ dari semua produksi penangkapan ikan dilaut. Sehingga hal tersebutlah yang menjadikan usaha penangkapan ikan di Muncar merupakan pusat sentra kegiatan perikanan di Kabupaten Banyuwangi (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 29).

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar merupakan salah satu tempat pelelangan ikan di Kecamatan Muncar yang paling menonjol di propinsi Jawa Timur karena mampu menggerakkan roda perekonomian wilayah setempat. Berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar merupakan tempat pertemuan arus Laut Jawa dari arah utara dan Samudra Hindia melalui arah selatan. Kondisi perairan yang sedemikian rupa sangat memudahkan nelayan dalam memproduksi sumberdaya perikanan, karena dalam kegiatan melaut para nelayan tidak terpengaruh dengan adanya gelombang besar yang disebabkan oleh angin barat maupun angin timur. Sehingga para nelayan pun tentunya juga diuntungkan, karena dengan terjadinya kondisi tersebut mereka hanya berhenti melaut pada bulan tertentu, yakni saat bulan purnama tiba selama 7 hingga 10 hari (Harahap dan Pribadi, 2009).

Kemudahan dalam kegiatan produksi sumberdaya perikanan, menjadikan kawasan Muncar memiliki akses terhadap pengadaan bahan baku yang digunakan untuk pengolahan dan pemasaran. Sebagai daerah produksi perikanan terbesar di daerah Banyuwangi, sebagian besar hasil tangkapan ikan di Muncar dijadikan sebagai bahan baku melalui proses pengolahan kembali yang dilakukan di daerah Muncar, sehingga dapat mendukung pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (Lubis *et al.*, 2013: 78). Dalam setiap usaha pengolahan bahan baku yang digunakan berbeda-beda, tergantung dari jenis produksi yang akan dipasarkan. Bahan baku yang digunakan oleh sebagian industri ialah hasil buangan atau bagian ikan yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh industri lain, seperti potongan ikan dan isi perut ikan dari perusahaan pengalengan ikan yang dapat diproses menjadi bahan baku pembuatan tepung ikan. Adapun industri minyak ikan, bahan baku yang digunakan ialah berasal dari ikan yang sudah tidak dimanfaatkan oleh perusahaan lain (Setiyono dan Yudo, 2008: 140).

Berbagai macam industri pengolahan ikan baik berskala besar, kecil maupun skala industri rumah tangga telah berkembang disekitar lokasi pelabuhan dan sudah menjadi ciri khas wilayah Muncar. Adapun jenis industri pengolahan yang terdapat di wilayah Muncar antara lain: industri minyak ikan, pengalengan ikan, pemindangan ikan, tepung ikan dan pengolahan ikan lainnya yang telah tumbuh dan berkembang di wilayah ini. Pada periode tahun 2007, diwilayah Muncar terdapat sekitar 52 industri pengolahan ikan skala besar dan 39 industri pengolahan ikan skala kecil atau rumah tangga (Setiyono dan Yudo, 2008: 138). Beberapa industri pengolah ikan berlokasi di kawasan pesisir karena dalam kegiatan pengiriman peroduk ke luar Pulau Jawa maupun ke luar negeri menggunakan transportasi laut berupa kapal. Selain itu, tersebar industri penepungan ikan dikawasan pesisir juga telah sesuai dengan karakteristik industri perikanan yang berlokasi tidak jauh dengan tempat produksi bahan baku (Utami *et al.*, Tanpa Tahun).

Lokasi kawasan yang strategis dan tersedianya sumberdaya perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan bahan baku sebagai pengolahan dan pemasaran, menjadikan Kecamatan Muncar secara alami cocok untuk mengembangkan usaha dalam bidang perikanan, sehingga hal tersebutlah yang mendukung wilayah Kecamatan Muncar sangat strategis untuk diterapkan program minapolitan, yang kemudian ditetapkan pula sebagai zona inti kawasan minapolitan.

4.3 Memiliki Komoditas Unggulan Bidang Perikanan

Komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk dikembangkan karena memiliki prospek pengembangan tinggi di masa depan, selain itu ketersediaannya juga melimpah dan mampu meningkatkan penghasilan maupun kesejahteraan masyarakatnya (Kementrian Pekerjaan Umum, 2012: 54). Komoditas perikanan di wilayah Muncar beragam jenisnya, namun berdasarkan data produksi perjenis ikan oleh UPT. P2SKP Muncar Banyuwangi, pada periode tahun 2009 tercatat ikan jenis lemuru merupakan komoditas perikanan yang jumlah produksinya paling besar yaitu

sebanyak 28.446.134 kg, kemudian disusul dengan jenis ikan layang sebanyak 1.067.070 kg dan tongkol sebanyak 1.032.177 kg. Ketiga jenis komoditas tersebut merupakan komoditas perikanan dengan jumlah produksinya paling tinggi dibandingkan jenis ikan yang lain (lihat lampiran gambar 6.3a).

Ikan lemuru menjadi komoditas yang jumlah produksinya paling besar, hal tersebut dikarenakan Selat Bali merupakan perairan yang kaya akan plankton, sehingga mengindikasikan kesuburan perairannya. Ketika tiba saat musim timur, biasanya akan terjadi *upwelling* atau pembalikan masa air yang terjadi di bagian selatan Selat Bali yang berdampak pada meningkatnya sumberdaya ikan lemuru (Wijaya dan Koeshendrajana, 2009: 3). Sebagai komoditas yang jumlahnya paling besar, ikan lemuru (*sardinella lemuru*) merupakan salah satu sumberdaya ikan yang memiliki potensi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi di wilayah Muncar. Jenis ikan lemuru mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat setempat, diantaranya yaitu: (1) sebagai sumber pendapatan utama masyarakat nelayan setempat; (2) mobilisasi aktivitas ekonomi wilayah, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja pada berbagai bidang usaha seperti usaha penangkapan, industri pengolahan, industri jasa transportasi dan pemasaran hasil sumberdaya perikanan; (3) sebagai penyedia bahan baku industri pengolahan; (4) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Simbolon *et al.*, 2011: 294).

Mengingat pentingnya peranan ikan jenis lemuru bagi masyarakat setempat, maka apabila dalam produksinya terjadi penurunan tentunya akan sangat berpengaruh nyata terhadap kegiatan perekonomian masyarakat setempat, seperti industri pengolahan ikan, jasa angkutan dan pendapatan masyarakat nelayan sendiri (Joesidawati *et al.*, 2005: 2). Menurut pandangan masyarakat nelayan pesisir pelabuhan Muncar, apabila hasil tangkapan ikan lemuru mengalami penurunan mereka akan beranggapan tidak ada produksi ikan, walaupun untuk jenis ikan selain lemuru seperti layang, tonggol, layur dan lain-lain jumlah produksinya cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan ikan lemuru merupakan produksi unggulan yang mendominasi di pelabuhan Muncar, banyak pabrik-pabrik disekitar pelabuhan yang tumbuh dan berkembang karena

keberadaan komoditas ikan lemuru (wawancara dengan Umar, tanggal 16 Juli 2019).

Ikan lemuru merupakan komoditi perikanan yang sifatnya memiliki lemak yang tinggi sehingga mudah mengalami kerusakan fisik yang berakibat pada penurunan kualitasnya. Hasil produksi ikan lemuru, selain dikonsumsi sendiri juga digunakan sebagai bahan baku olahan seperti pemindangan, pengalengan, penepungan dan usaha pengeringan yang dilakukan oleh nelayan maupun perusahaan swasta. Dari segi pemasarannya, selain dijual dalam bentuk ikan segar juga dipasarkan dalam bentuk olahan. Daerah pemasarannya yaitu meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan di ekspor ke luar negeri (Wijaya dan Koeshendrajana, 2009: 6). Untuk jenis ikan tongkol dipasarkan dalam bentuk ikan segar, dan sebagian hanya bisa disetorkan ke industri pemindangan. Kemudian untuk hasil produksi jenis ikan layang, selain dijual dalam bentuk ikan segar juga diolah dalam bentuk ikan pindang dan disetorkan pula ke pabrik-pabrik pengalengan ikan. Meskipun ikan lemuru dan layang bisa masuk ke pabrik pengalengan, namun untuk permintaan pasar lebih banyak pada ikan lemuru, sehingga hal tersebut menjadikan ikan lemuru sebagai komoditas andalan yang unggul di wilayah Muncar (wawancara dengan Rini, tanggal 19 Juni 2019).

Komoditas perikanan di wilayah Muncar memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena turut didukung oleh pelaku utama usaha perikanan dimana sebagian besar adalah penduduk setempat yang bekerja di kawasan pesisir Muncar. Sebagian besar hasil produksi ikan di Muncar diproses dan diolah kembali di daerah Muncar, sehingga hal tersebut menjadikan sektor perikanan lautnya menjadi berkembang ke dalam sektor industri pengolahan ikan yang mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi (Mira, 2007: 141). Pada tahun 2009, penangkapan ikan menjadi cabang usaha terbesar yang memberikan pemasukan yakni sebesar 89,71%. Kecamatan muncar telah menjadi kawasan yang mendominasi produksi perikanan sebesar 94,03% dari semua produksi penangkapan ikan di laut. Hal tersebut dikarenakan usaha penangkapan ikan di Muncar merupakan sentra kegiatan perikanan yang berada di Kabupaten Banyuwangi (Eri, 2014). Berdasarkan data UPT. P2SKP Muncar tahun 2009,

tercatat jumlah nelayan Muncar yaitu sebanyak 13.330 orang dengan didukung oleh industri pengolahan ikan sebanyak 216 unit (lihat lampiran gambar 6.3b). Tidak mengherankan apabila kegiatan usaha penangkapan komoditas lemuru menjadi mata pencaharian andalan bagi keluarga nelayan di Muncar. Berbagai usaha penangkapan lemuru juga telah menimbulkan *multiplier effect* karena produksi hasil tangkapan ikan di Muncar sebagian besar diproses atau diolah kembali di daerah Muncar, hal tersebut menjadikan sektor perikanan laut di Muncar menjadi berkembang ke dalam sektor industri pengolahan ikan yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi (Mira, 2007: 144).

Sebagai komoditas yang paling menguntungkan, maka jenis ikan lemuru dikategorikan sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Muncar. Tersedianya komoditas unggulan dan besarnya produksi tangkapan ikan di Muncar, menjadikan kawasan tersebut cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman umum minapolitan, kawasan Muncar juga telah memenuhi salah satu persyaratan menjadi kawasan minapolitan karena memiliki komoditas unggulan dibidang perikanan. Sehingga hal tersebut juga menjadi faktor pendukung yang melatar belakangi Kecamatan Muncar menjadi kawasan yang diterapkan program minapolitan.

4.4 Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan fasilitas yang dapat memberikan dukungan bagi perkembangan Kecamatan Muncar sebagai kawasan minapolitan. Fasilitas pendukung dalam hal ini yaitu berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan produksi hasil tangkapan ikan, aksesibilitas terhadap pasar seperti bantuan permodalan, keberadaan lembaga-lembaga usaha yang juga diberikan fasilitas berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Di Kecamatan Muncar terdapat fasilitas sarana prasarana produksi dan pendaratan ikan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar yang turut didukung dengan adanya armada kapal dan alat penangkap ikan. Pelabuhan Muncar memiliki beberapa fasilitas sarana prasarana perikanan tangkap yang kondisinya cukup baik, beberapa fasilitas

pendukung yang tersedia terdiri dari 3 kelompok yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Fasilitas pokok merupakan fasilitas dasar yang diperuntukkan guna mendukung kegiatan di pelabuhan, tujuannya yaitu untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal dalam berlayar, baik pada waktu keluar masuk pelabuhan maupun berlabuh di pelabuhan (Lubis dalam Rosana dan Prasita, 2016: 25). Fasilitas pokok di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar yaitu meliputi: (1) lahan pelabuhan seluas 77.500 m²; (2) kolam pelabuhan seluas 5,1 Ha; (3) TPI Kalimoro seluas 1.525 m²; (4) *Jetty/Pier* seluas 800 m²; (5) turap Kalimati seluas 500 m²; (6) *break water* dengan panjang sebesar 170 m²; (7) tembok penahan tanah seluas 800 m²; (8) dermaga seluas 818 m²; (9) jalan kompleks 3.000 m²; (10) *slipway* seluas 360 m² dengan jumlah 3 unit; (11) jembatan penghubung desa berukuran 82 m² (UPT. P2SKP, 2009).

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan nilai guna fasilitas pokok, yang digunakan sebagai penunjang kebutuhan operasional di pelabuhan perikanan (Lubis dalam Rosana dan Prasita, 2016: 26). Fasilitas fungsional yang tersedia di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar yaitu sebagai berikut: (1) Gedung, yang terdiri dari TPI Pelabuhan seluas 1.450 m², TPI Kalimoro seluas 200 m², TPI Tratas seluas 200 m², TPI Sampangan seluas 200 m²; (2) gedung serbaguna seluas 465 m²; (3) Gedung peralatan seluas 300 m²; (4) rumah tangki BBM seluas 50m²; (5) rumah genzet seluas 36 m²; (6) rumah pompa seluas 30 m²; (7) menara air berkapasitas 72 m³; (8) gardu listrik berukuran 50 KVA; (9) tangki BBM berukuran 50.000 liter; (10) bengkel seluas 110m²; (11) MCK 110m²; (12) pos keamanan seluas 28 m² m² (UPT. P2SKP, 2009).

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan peranan pelabuhan, sehingga para masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut mendapatkan kenyamanan dalam melakukan aktifitas di pelabuhan (Lubis dalam Rosana dan Prasita, 2016: 26). Adapun fasilitas penunjang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar yaitu sebagai berikut: (1) kantor KUD Mino seluas 34,5 m²; (2) perpustakaan seluas 62 m²; (3) kantor

POLAIR seluas 42 m²; (4) rumah Dinas POLAIR seluas 64 m²; (5) kantor Syahbandar 64 m²; (6) Balai kesehatan seluas 154 m²; (7) mushola seluas 56 m²; (8) rumah dinas seluas 122 m²; (9) gedung saprokan seluas 120 m² berjumlah 20 unit; (10) gedung saprokan seluas 152 m² berjumlah 8 unit; (11) gedung tempat keranjang seluas 56 m² berjumlah 10 unit; (12) pagar keliling berukuran 710 m²; (13) wisma “lemuru” seluas 280,5 m²; (14) *guest house* seluas 225 m²; (15) kantor pengawas perikanan seluas 93 m² m² (UPT. P2SKP, 2009).

Tersedianya beberapa prasarana seperti fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, dapat mendukung seluruh kegiatan operasional pelabuhan Muncar. Selain beberapa fasilitas tersebut, di pelabuhan Muncar juga turut didukung oleh fasilitas berupa peralatan yang digunakan untuk memproduksi bahan baku yaitu armada dan alat penangkap ikan. Tersedianya armada penangkapan ikan merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung keberhasilan dalam kegiatan penangkapan ikan (Imron *et al*, 2017: 102). Berdasarkan data UPT. P2SKP Muncar terdapat tiga jenis armada yang tersedia yaitu kapal motor, perahu motor tempel dan perahu tanpa motor dengan rincian jumlah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Armada di PPP Muncar tahun 2009

No	Jenis Armada	Jumlah (Unit)
1.	Kapal Motor	
	5 GT	568
	5 GT – 10 GT	316
	10 GT – 30 GT	190
2.	Perahu Motor Tempel	676
3.	Perahu Tanpa Motor	121
Jumlah		1.871

Sumber: UPT. P2SKP Tahun 2009

Berdasarkan tabel jumlah armada armada diatas, tercatat di pelabuhan Muncar terdapat 1.871 unit armada yang digunakan oleh para nelayan. Jumlah armada penangkap ikan di pelabuhan Muncar dapat berubah-ubah, hal tersebut dikarenakan faktor bertambahnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan

(Imron *et al.*, 2017: 103). Armada penangkap ikan yang tersedia di pelabuhan Muncar pada dasarnya berasal dari Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jembrana, dengan ukuran mati atau *Gross Ton* (GT) kapal maksimum yaitu 30 GT (Umar, 2013: 65). Sebagai sarana produksi, armada penangkapan ikan juga turut didukung oleh alat penangkap ikan yang dimiliki oleh para nelayan Muncar dengan rincian jumlah secara lengkap yang tersaji pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Jumlah Alat Penangkap Ikan di PPP Muncar tahun 2009

No.	Jenis Alat Penangkap Ikan	Jumlah (Unit)
1.	Purse Seine (Pukat cincin)	203
2.	Payang (pukat kantong)	42
3.	Gill Net (jaring insang)	907
4.	Lift Net (jaring angkat)	120
5.	Hook and Line (pancing)	682
6.	Traps (perangkap)	224
Jumlah		2.124

Sumber: UPT. P2SKP Tahun 2009

Jumlah keseluruhan alat penangkap ikan di pelabuhan Muncar pada periode tahun 2009 yaitu sebanyak 2.124 unit. Namun jumlah setiap tahunnya dapat berubah, hal ini dikarenakan adanya pergantian penggunaan alat tangkap yang dilakukan oleh para nelayan. Rata-rata para nelayan tidak hanya memiliki satu alat tangkap, nelayan biasa mengganti alat tangkapnya dengan menyesuaikan kondisi potensi sumberdaya ikan yang tersedia (Imron *et al.*, 2017: 104). Disisi lain, bertambahnya jumlah alat tangkap juga disebabkan oleh jumlah nelayan yang terus bertambah setiap tahunnya, sehingga hal tersebut sangat memungkinkan jumlah alat tangkap yang ada di Muncar semakin bertambah per unitnya (wawancara dengan Umar, tanggal 16 Juli 2019).

Tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana menjadikan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar sebagai kawasan yang mendominasi produksi perikanan terbesar. Usaha penangkapan ikan di kawasan Muncar telah menjadi sentra kegiatan perikanan di Kabupaten Banyuwangi, karena kegiatan

penangkapan ikan telah dilaksanakan secara intensif dengan menggunakan armada dan alat tangkap ikan yang kondisinya cukup memadai (Umar, 2013: 67).

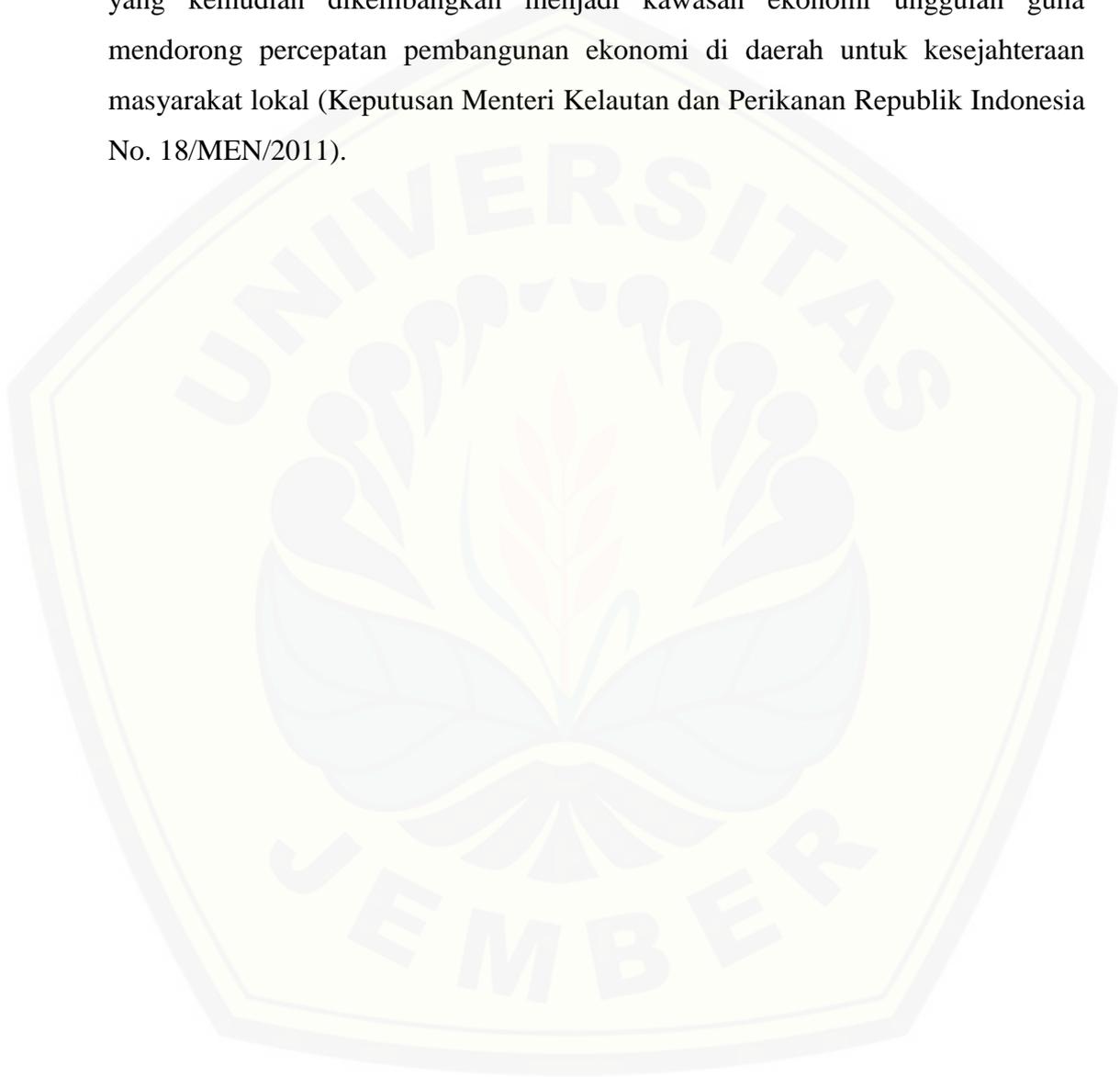
Selain berbagai fasilitas sarana prasarana tersebut, di Kecamatan Muncar juga terdapat kemudahan dalam akses terhadap bantuan peminjaman dan permodalan seperti adanya koperasi dan kelompok-kelompok usaha. Tersedianya lembaga usaha seperti koperasi maupun kelompok usaha sangat penting karena merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat dengan ekonomi kelas menengah kebawah. Di kawasan Muncar terdapat satu Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah aktif mulai tahun 1975 yaitu KUD Mina Blambangan. Dalam sistem keanggotaannya, tidak semuanya nelayan menjadi anggota di KUD Mina Blambangan, masyarakat nelayan yang tidak termasuk dalam keanggotaan KUD biasanya dalam permodalannya mereka meminjam uang ke pengambek atau pengusaha pengolahan ikan. Para nelayan di Muncar telah terbiasa meminjam uang atas dasar kepercayaan kepada pengambek, namun dalam kegiatan ini terdapat syarat yaitu nelayan harus menjualkan ikannya melalui perantara pengambek selaku pihak yang telah meminjamkan uang. Sehingga dalam sistem permodalan tersebut, seorang pengambek memiliki kendali sebagai penyalur produksi ikan ke pabrik maupun industri pengolah ikan yang ada di wilayah Muncar. Sedangkan untuk masyarakat nelayan yang memiliki pekerjaan ganda seperti pengusaha atau memiliki usaha pengolahan ikan, dalam permodalannya mereka akan melakukan peminjaman pada bank. Untuk peminjaman pada bank prosedurnya lebih sulit, karena nelayan harus memiliki jaminan dalam peminjamannya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 48).

Selain koperasi, di Muncar terdapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan fasilitas permodalan dengan sistem kredit. KUR adalah program dari pemerintah dengan kredit yang diberikan hingga mencapai Rp 500 juta, kredit ini diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi kepada orang yang memiliki usaha produktif dengan didukung fasilitas penjaminan sepenuhnya dari bank. Dalam hal ini, pemerintah juga turut memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar

70% sementara sisanya yaitu sebesar 30% ditanggung oleh bank yang melaksanakan. BNI merupakan bank yang telah menyalurkan KUR kepada UMKM-K di wilayah Muncar, dengan ketentuan untuk kredit sampai dengan 5 juta rupiah, tingkat bunga kredit yang dikenakan maksimal 24% efektif per tahun, sedangkan untuk kredit diatas 5 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tingkat kredit yang dikenakan maksimal 16% efektif per tahun. Dengan adanya persyaratan yang telah ditentukan oleh sistem kredit KUR tersebut, menjadikan para nelayan kurang tertarik dengan penawaran tersebut, mereka tetap banyak yang memilih untuk melakukan peminjaman uang kepada pengambang karena kemudahan syarat yang diberikan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 49).

Di wilayah Muncar, juga terdapat beberapa lembaga-lembaga usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang juga diberikan fasilitas berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan badan usaha baik yang sudah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha dan mempertanggungjawabkan secara bersama untuk meningkatkan pendapatan bagi seluruh anggota (Hiariey dan Romeon, 2017: 69). KUB yang terdapat di wilayah Muncar yaitu bidang usaha perikanan tangkap yang terdiri dari KUB nelayan serta KUB pengolah dan pemasaran atau yang biasa disebut dengan POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar) ikan. Beberapa KUB yang terdapat di wilayah Muncar juga diberikan fasilitas berupa penyuluhan dan pelatihan yang setiap tahunnya rutin dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan (wawancara dengan Widi, tanggal 25 Juli 2019). Selain dari Dinas Kabupaten, kegiatan pelatihan juga dilaksanakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang cara mengolah hasil tangkapan ikan menjadi berbagai jenis makanan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi pendapatan masyarakat nelayan Muncar (wawancara dengan Umar, tanggal 16 Juli 2019).

Tersedianya berbagai fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana, bantuan permodalan, serta keberadaan lembaga-lembaga usaha tersebut telah menjadikan kawasan Muncar memenuhi syarat sebagai kawasan Minapolitan. Sehingga Kecamatan Muncar ditetapkan sebagai zona inti kawasan minapolitan yang kemudian dikembangkan menjadi kawasan ekonomi unggulan guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah untuk kesejahteraan masyarakat lokal (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18/MEN/2011).



BAB 5. IMPLEMENTASI PROGRAM MINAPOLITAN DI KECAMATAN MUNCAR TAHUN 2010-2014

Program minapolitan di Kecamatan Muncar, telah dicanangkan sejak tahun 2010, namun dalam implementasinya dimulai pada tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan, sehingga dalam periode tahun 2010 sampai 2012 dilakukan kegiatan persiapan sebelum nantinya dapat diimplementasikan (wawancara dengan Edi, tanggal 23 Juli 2019). Namun meskipun demikian, terdapat beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010, hal tersebut dikarenakan Kecamatan Muncar merupakan kawasan minapolitan yang sudah berkembang dengan baik (Wiadnya, 2011). Pelaksanaan kegiatan program minapolitan telah dipaparkan pada Draft Akhir Master Plan Minapolitan, dalam bentuk matrik program tahunan kegiatan minapolitan perikanan tangkap (lihat lampiran 6.4). Pada matrik program tahunan tersebut, terdiri dari tiga kelompok kegiatan minapolitan berbasis perikanan tangkap, diantaranya yaitu kegiatan pembangunan infrastruktur, pembangunan perikanan, dan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

5.1 Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan sistem infrastruktur merupakan salah satu pendorong keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan (Kementrian Pekerjaan Umum, 2012: 56). Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan untuk mendukung kegiatan masyarakat (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 114). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan guna mengoptimalkan seluruh kegiatan operasional pelabuhan. Pembangunan infrastruktur dalam implementasi program minapolitan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar meliputi

beberapa kegiatan yaitu: (1) pembangunan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja operasional pelabuhan yang meliputi tanggul, irigasi, relokasi pemukiman (sosialisasi/pengadaan tanah), drainase, penerangan (pemukiman), drainase (pemukiman); (2) pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada fasilitas pendidikan (Balai Latihan Kerja dan SMK Kelautan); (3) pembangunan jalan masuk ke lokasi perwakilan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM); dan (4) pembangunan dan peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dikawasan wilayah operasional pelabuhan perikanan.

1. Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan

Pembangunan infrastruktur di wilayah kerja operasional pelabuhan yaitu berupa pembangunan tanggul, irigasi, relokasi pemukiman, drainase, penerangan dan darinase yang terdapat di wilayah pemukiman. Pembangunan tanggul yang dimaksudkan dalam implementasi program minapolitan di Muncar yaitu pembangunan tanggul pelabuhan atau yang biasa disebut *break water*. Pembangunan *break water* dilakukan untuk memfasilitasi tambat labuh, sehingga proses pembangunannya dilaksanakan bersamaan dengan perluasan kolam labuh di pelabuhan Muncar (lihat lampiran gambar 6.1a).

Pembangunan kolam labuh dilaksanakan karena kolam pelabuhan di PPP Muncar telah mengalami pendangkalan, sehingga mengganggu proses pendaratan ikan maupun pergerakan kapal nelayan. Selain itu, luas kolam di PPP Muncar tidak dapat menampung perahu untuk bertambat di kolam pelabuhan, sehingga kolam pelabuhan dapat berfungsi hanya pada saat terjadi pasang air laut (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 52). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan pembangunan pemecah gelombang atau *break water* sisi timur dan sisi barat, yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 (UPT. PPP Muncar, 2014). Pembangunan yang telah dilaksanakan, menjadikan kolam labuh bertambah luasnya. Sebelum dibangun, kolam labuh di PPP Muncar hanya memiliki luas sebanyak 5 hektar. Kemudian setelah dibangun, bertambah menjadi 20 hektar dengan dilengkapi *break water* di sebelah barat yaitu sepanjang $\pm 750 \text{ m}^2$, sedangkan untuk sebelah timur yaitu sekitar 250 m^2 . Pembangunan

break water bertujuan untuk melindungi tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan dari gangguan gelombang, sehingga apabila nelayan akan melakukan pendaratan tidak terganggu oleh gelombang dan ketika musim gelombang tinggi kapal nelayan bisa berlindung di dalam kolam labuh yang telah disediakan (wawancara dengan Umar, tanggal 16 Juli 2019).

Selanjutnya, untuk pembangunan irigasi tidak dilaksanakan, karena dalam penyediaan air bersih di wilayah operasional pelabuhan sarana yang digunakan yaitu berupa instalasi air bersih. Pembangunan instalasi air bersih di wilayah operasional pelabuhan, dilakukan guna meningkatkan sarana dan prasana penunjang sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012 pembangunan instalasi air bersih telah dilaksanakan di TPI Brak Kalimoro Muncar. Fasilitas tersebut, telah dimanfaatkan oleh ±200 nelayan Muncar (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2012: 43). Kemudian pada tahun 2013, pembangunan instalasi tidak dilakukan. Namun pada tahun 2014, pembangunan instalasi air bersih kembali dilaksanakan di Kecamatan Muncar yang berlokasi di TPI Satelit (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2014: 49). Dengan tersedianya instalasi air bersih yang berada di beberapa TPI Kecamatan Muncar, maka ketersediaan air bersih di kawasan TPI menjadi lebih terjamin.

Kemudian, di wilayah operasional pelabuhan Muncar telah dilakukan pula pembangunan drainase (lihat lampiran gambar 6.1b). Pembangunan drainase dilaksanakan di areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) karena sudah tidak berfungsi secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi bangunan drainase yang kurang kemiringannya sehingga mengakibatkan limbah cair tidak dapat mengalir dengan lancar. Kontruksi areal jalan disekitar TPI yang berupa lahan paving dengan kondisi yang kurang miring, juga telah menyebabkan limbah cair sulit masuk ke saluran drainase, sehingga perlu dilakukan perbaikan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 109). Selain di wilayah operasional pelabuhan, pembangunan drainase juga dilakukan di wilayah pemukiman sekitar pelabuhan Muncar, pembangunan drainase tersebut berfungsi sebagai saluran untuk mengendalikan air yang jumlahnya berlebih sehingga tidak menimbulkan

dampak negatif seperti banjir dan tentunya memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara umum (Novrianti, 2017: 32).

Disisi lain, peningkatan fasilitas penerangan juga telah dilaksanakan (lihat lampiran gambar 6.1e). Pada tahun 2012, pembangunan lampu penerangan disepanjang kawasan TPI Muncar, mulai dari TPI Brak Kalimoro, TPI Sampangan, dan TPI Satelit telah dilaksanakan. Fasilitas penerangan yang telah diadakan, telah dinikmati oleh ±11.000 nelayan. Dengan adanya lampu penerangan tersebut, maka nelayan bisa melakukan aktivitas bongkar muat ikan di malam hari (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2012: 43). Kemudian, penambahan fasilitas penerangan kembali dilakukan pada tahun 2013. Berdasarkan laporan tahunan UPT. Pelabuhan Perikanan Muncar, pada tahun 2013 telah dilakukan penambahan pada fasilitas fungsional berupa tiang listrik sebanyak 12 unit dan masing-masing berkapasitas 3000 watt. Dengan demikian, maka jaringan listrik telah ditingkatkan dan tersalurkan hingga ke seluruh kawasan operasional pelabuhan Muncar.

Untuk kegiatan relokasi pemukiman dalam implementasi program minapolitan tidak dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena di wilayah operasional pelabuhan tidak terdapat pemukiman yang perlu dilakukan relokasi. Di kawasan pelabuhan Muncar, pada tahun 2012 hanya dilakukan pembangunan fasilitas secara permanen dan renovasi terhadap tempat penjualan ikan dikawasan los pasar ikan tradisional Brak Kalimoro yang kondisinya kurang baik. Selain itu, dilakukan pula penataan pada tempat penjemuran dan pengasinan ikan yang berada di dalam pelabuhan agar posisinya lebih baik, bersih dan tertata rapi (lihat lampiran gambar 6.1c), namun untuk tempat yang digunakan tidak berpindah lokasinya (wawancara dengan Umar, tanggal 31 Juli 2019).

2. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan

Pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan dalam kegiatan ini yaitu meliputi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMK Kelautan. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) telah dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berlokasi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan gedung BLK ini dilakukan atas usul dari

Pemkab Banyuwangi yang mengajukan usul pada Kementerian Ketenagakerjaan tepatnya pada tahun 2013, usul tersebut kemudian mendapatkan tanggapan yang positif sehingga pembangunan dapat terealisasi pada tahun 2014. Didirikannya Gedung BLK, bertujuan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga gedung tersebut dapat digunakan sebagai prasarana pelatihan guna memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pemberian bekal keahlian. Gedung BLK dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang sedang berada dalam usia angkatan kerja produktif dan belum memiliki pekerjaan, selain itu juga diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keahlian yang dimiliki. Ruang kelas *workshop* yang dimiliki gedung BLK masing-masing mampu menampung hingga 40 peserta. Setiap peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan di BLK tidak dikenakan biaya. Selain itu setelah BLK ini sudah beroperasi, peserta BLK akan mendapatkan sertifikat keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, sehingga para peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan keterampilan dan keahlian. Sertifikat yang telah dimiliki peserta, nantinya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan, kemudian untuk keahlian dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan, dapat bermanfaat untuk bekal dalam memulai usaha (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2015).

Selain pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), peningkatan fasilitas pendidikan program minapolitan juga turut didukung oleh adanya SMK jurusan kelautan yaitu SMKN Darul Ulum Muncar yang telah menyediakan jurusan Teknik Kapal Penangkap Ikan (TKPI). Seluruh siswa yang masuk jurusan TKPI, akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang cara mengoperasikan kapal penangkap ikan. Kemudian siswa juga di bekal pengetahuan tentang cara menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang benar dan diajarkan pula cara penanganan hasil tangkapan ikan agar kondisi kesegaran ikan dapat bertahan hingga sampai ke tempat pendaratan (wawancara dengan Widi, tanggal 25 Juli 2019). Pengetahuan tentang penanganan hasil tangkapan ikan sangat penting, karena dalam sistem pemasaran terkadang ada pedagang yang kurang memahami tentang cara penanganan ikan yang baik, mereka ada yang menambahkan air kolam

pelabuhan ke wadah yang berisi ikan hasil tangkapan. Hal tersebut tentunya tidak benar karena menambahkan air kolam pelabuhan yang kondisi airnya tidak bersih justru akan membuat ikan semakin cepat mengalami penurunan terhadap kualitasnya (Lubis *et al.*, 2013: 84).

Selanjutnya, mereka juga lebih mengenal alat-alat modern seperti GPS (*Global Positioning System*) untuk mendeteksi keberadaan ikan dan bisa mengatur titik lintang dan bujur posisi kapal yang sedang berada di tengah laut. Sehingga dengan adanya SMK jurusan bidang kelautan di Muncar, diharapkan kedepannya dapat menciptakan generasi nelayan-nelayan modern yang memiliki pengetahuan, wawasan yang luas dan mereka akan paham betul pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dengan cara melakukan penangkapan ikan yang benar sesuai dengan peraturan Undang-undang. Dengan beberapa kompetensi yang dimiliki, nantinya para siswa lulusan SMK jurusan kelautan akan siap bersaing untuk dipekerjakan dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri (wawancara dengan Umar, tanggal 31 Juli 2019).

3. Pembangunan Jalan Masuk Lokasi Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM)

Pembangunan jalan di lokasi Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang telah di kerjakan. Pembangunan jalan dilakukan karena infrastruktur jalan merupakan pra-sarana penting sebagai modal transportasi, jika akses jalan menuju kawasan minapolitan susah dilalui maka kawasan tersebut akan sulit untuk berkembang (wawancara dengan Umar, tanggal 16 Juli 2019). Untuk jalan dilokasi operasional pelabuhan juga telah dibangun menggunakan perkerasan kaku atau *rigid pavement* (lihat lampiran gambar 6.1f). Perkerasan kaku merupakan perkerasan jalan dengan menggunakan semen sebagai bahan pengikat, sehingga jalan tersebut memiliki tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi (Fitriana, 1: 2014). Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan tersebut, menjadikan jalan-jalan menuju pusat zona inti kawasan minapolitan secara keseluruhan bisa dilalui dengan lancar sehingga memudahkan aktivitas penyaluran bahan logistik di wilayah operasional pelabuhan.

4. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di kawasan operasional pelabuhan Muncar, telah dilakukan dengan mengadakan tempat sampah sampah kecil yang tersebar di beberapa titik wilayah operasional pelabuhan. Pengadaan tempat sampah telah dilakukan pada tahun 2011 dengan jumlah sebanyak 8 unit tempat sampah (Laporan Tahunan UPT. Pelabuhan Perikanan Muncar, 2014). Masing-masing tempat sampah terdiri dari dua bagian guna memisahkan antara sampah organik dan anorganik (lihat lampiran gambar 6.1g). Tempat sampah tersebut digunakan untuk menampung sementara sampah-sampah yang berasal dari aktivitas nelayan, pedagang maupun masyarakat lainnya. Dalam pengelolaannya, tempat sampah yang telah penuh akan dibuang oleh petugas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya berada diluar pelabuhan Muncar (wawancara dengan Umar, tanggal 16 Juli 2019). Tersedianya tempat sampah telah memudahkan masyarakat nelayan maupun pedagang dalam membuang sampah, sehingga hal tersebut dapat mengurangi sampah-sampah di kawasan pelabuhan yang dikhawatirkan akan berserakan hingga ke dasar laut.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan akan dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Warsilan dan Noor, 2015: 359). Fasilitas pelabuhan perikanan yang baik tentunya dapat menunjang aktivitas kepelabuhan menjadi lebih cepat dan efektif, sehingga akan menjadikan roda perekonomian di wilayah Muncar menjadi bergeliat dan penuh semangat dengan didukung keterlibatan ribuan tenaga bongkar dan pemisah jenis ikan hasil tangkapan nelayan. Kegiatan tersebut, telah melibatkan banyak pihak seperti ibu-ibu isteri nelayan maupun sopir pengangkut ikan. Inti dari pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nelayan, keluarga nelayan, masyarakat umum sekitar kawasan pelabuhan, pelaku usaha, maupun para pemodal agar berada dalam satu kawasan. Sehingga apabila aktivitas kepelabuhan tinggi, maka akan dapat menyerap ribuan tenaga kerja sesuai dengan

bidang dan kemampuan masing-masing guna membangun kesejahteraan ekonomi (Eri, 2014).

5.2 Pembangunan Perikanan

Pembangunan perikanan merupakan salah satu bentuk dari implementasi program minapolitan yang terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya yaitu: (1) operasi penertiban dan pengawasan perairan serta pembinaan terhadap nelayan; (2) penanaman mangrove; (3) *restocking* Sumber Daya Ikan (SDI); (4) pengadaan alat penangkap ikan; dan (5) pengadaan sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berupa timbangan. Beberapa kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara bertahap, untuk lebih jelasnya berikut pemaparannya.

1. Operasi Penertiban dan Pengawasan Perairan serta Pembinaan terhadap Nelayan

Kecamatan Muncar merupakan sentra penghasil ikan di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki daerah tangkapan di Paparan Jawa Selat Bali dengan luas 960 mil² atau setara dengan panjang garis pantai timur Banyuwangi (Pamungkas, 2013: 9). Sebagai pusat penghasil perikanan terbesar, tentunya perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan perairan agar sumberdaya perikanan tidak dimanfaatkan secara berlebihan, serta mengurangi pelaku *illegal fishing* di perairan Muncar. Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan melaksanakan operasi penertiban dan pengawasan perairan, serta pembinaan terhadap nelayan.

Pada tahun 2010 dan 2011, telah dilaksanakan kegiatan operasi pengawasan perairan melalui tindakan preventif dan kuratif yaitu dengan menggelar operasi penertiban dan pengawasan Selat Bali. Kegiatan pengawasan dan penertiban perairan pada tahun 2010, dilaksanakan sebanyak 38 kali dalam setahun. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dilakukan pula pembentukan kelompok Pengelola Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas (PSBK). Tercatat pada periode tahun 2010, telah tertangkap 4 orang yang kemudian diamankan dan di proses hingga ke pengadilan akibat menggunakan bahan dan alat tangkap yang terlarang (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2010: 38; 2011: 48). Dengan demikian, kegiatan operasi dan pengawasan terus dilaksanakan secara

berkelanjutan setiap tahunnya untuk menghindari penyimpangan dalam melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya perikanan di perairan Selat Bali (wawancara dengan Edi, tanggal 23 Juli 2019; wawancara dengan Umar, tanggal 31 Juli 2019).

Tahun 2012 telah dilaksanakan 25 kali patroli pengawasan di wilayah perairan Selat Bali. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan sarana berupa 1 unit speedboat. Sarana tersebut masih kurang memadai, mengingat luasnya wilayah operasional pengawasan. Disisi lain jumlah staff pendukung kegiatan juga masih belum memadai, sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan capaian program. Pada periode tahun ini, kegiatan operasi dan pengawasan dilakukan dengan kegiatan pembinaan dan penyuluhan. Kegiatan pembinaan diperuntukkan bagi nelayan yang belum memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Hasilnya, sebagian besar nelayan masih banyak yang belum memiliki SIPI. Kemudian untuk penyuluhan, dilakukan penyadaran hukum kepada para nelayan yang telah tertangkap basah melakukan penyimpangan terhadap usaha penangkapan ikan (Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2012: 44). Kemudian, disepanjang tahun 2013 kegiatan patroli pengawasan telah dilaksanakan sebanyak 25 kali. Hasil dari kegiatan patroli pada tahun ini masih sama dengan tahun 2012, yakni sebagian besar masih banyak nelayan yang belum memiliki SIPI (Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2013: 50).

Selanjutnya, pada tahun 2014 telah dilaksanakan 27 kali patroli pengawasan. Para periode tahun ini belum ada penambahan sarana patroli, sehingga jumlah sarana yang digunakan tetap 1 unit speedboat, dengan jumlah staf pendukung yang juga masih belum memadai. Hal tersebut dikarenakan belum adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan SDM aparatur pendukung kegiatan, sehingga pada pelaksanaannya belum berjalan secara optimal (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2014: 54).

2. Penanaman Mangrove

Mangrove merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, tumbuhan ini sangat berperan penting dalam menjaga produktivitas perairan pesisir sekaligus mampu menunjang kehidupan masyarakat lokal (Raharja *et al.*,

2014: 37). Sebagai tumbuhan yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi perairan, penanaman mangrove sangat penting dilakukan. Terlebih saat kondisi perikanan tangkap mengalami penurunan produksi dan pencemaran perairan (Lavenia, 2015: 50). Kegiatan penanaman mangrove, merupakan bagian dari implementasi program minapolitan yang dilaksanakan di kawasan Teluk Pangpang, Kecamatan Muncar. Kegiatan ini dilakukan guna memperbaiki hutan mangrove yang jumlahnya semakin berkurang akibat dilakukannya pembabatan untuk perluasan tambak. Kerusakan hutan mangrove tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut di Selat Bali, hal tersebut dikarenakan hasil tangkapan ikan, kepiting dan kerang jumlahnya terus mengalami penurunan (Cahyaningrum, 2013). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kegiatan penanaman mangrove perlu dilakukan.

Pada tahun 2010, penanaman 5.000 bibit mangrove telah dilakukan di Dusun Tegalpare oleh OISCA (*Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement*) yang bekerjasama dengan LSM MDK (Model Desa Konservasi). Penanaman mangrove juga telah dilaksanakan rutin setiap tahun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, dengan diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat mulai tahun 2010 hingga 2014. Penanaman mangrove tersebut dilakukan untuk menyulami mangrove yang telah mati akibat tiram dan air pasang (Ardiyansyah, 2016: 34-35).

3. *Restocking* Sumber Daya Ikan (SDI)

Sumber daya ikan di perairan Selat Bali telah mengalami *over fishing* sehingga jumlah produksi ikan menjadi berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh pemanfaatan SDI yang dilakukan secara tidak merata karena sebagian besar penangkapan ikan terpusat di Selat Bali, sehingga dalam pengelolaannya dilakukan secara intensif dan mengarah pada terjadinya *over fishing* (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 50). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kegiatan *restocking* Sumber Daya Ikan (SDI) merupakan kegiatan yang dilakukan guna memperbaiki ketersediaan sumberdaya perikanan.

Kegiatan ini setiap tahun telah dilaksanakan dengan menebarkan bibit ikan. Untuk pendanaan, biasanya melalui dana APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten. Namun karena keterbatasan anggaran, maka pada tahun 2010 belum dapat dilaksanakan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2010: 33). Kemudian pada tahun 2011 telah dilaksanakan penebaran bibit udang dan ikan kerapu sebanyak 10.000 bibit, penebaran tersebut dilakukan di dasar laut sebagai induk pembibitan ikan baru (Cahyaningrum, 2011). Pada kegiatan pelepasan atau penebaran ikan tersebut, dilakukan pula pada ikan yang didapat dari hasil kegiatan operasi *illegal fishing*, sehingga ikan-ikan tersebut dapat kembali ke habitatnya kemudian bisa tumbuh dan berkembangbiak (wawancara dengan Widi, tanggal 25 Juli 2019). Kegiatan *restocking* SDI merupakan kegiatan yang terus berlanjut setiap tahunnya. Namun berdasarkan laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, pada periode tahun 2012 hingga 2014 kegiatan ini lebih difokuskan ke perairan umum yang kondisinya dianggap sudah kritis.

Selain itu, adapun tujuan kegiatan *restocking* SDI yaitu untuk memperbaiki ketersediaan ikan yang jumlahnya mengalami penurunan akibat kegiatan masyarakat dalam melakukan penangkapan menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan potassium dan bom ikan. Penggunaan pottasium dan bom tersebut selain menjadikan menurunnya populasi ikan, juga mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang terdapat di perairan Selat Bali. Sehingga untuk memulihkan kondisi tersebut dilakukan kegiatan transplantasi terumbu karang dengan melakukan perbaikan pada terumbu karang yang telah rusak dan penanaman kembali di dasar perairan. Dengan demikian, ketersediaan ikan yang jumlahnya menurun diharapkan setelah dilakukannya pelestarian terumbu karang tersebut dapat mendatangkan banyak ikan. Kegiatan ini juga didukung dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, tentang penggunaan alat penangkap ikan yang benaragar tidak merusak biota laut. Kemudian masyarakat juga diberikan penyadaran akan adanya peraturan hukum dan peringatan untuk tidak mengambil terumbu karang karena dapat merusak ekosistem laut (wawancara dengan Umar, tanggal 16 Juli 2019).

4. Pengadaan Alat Penangkap Ikan

Pengadaan alat penangkap ikan dalam hal ini yaitu berupa perahu jukung dan alat tangkap, namun untuk pengadaan perahu jukung tidak dilaksanakan di kawasan Muncar. Pengadaan alat tangkap telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011. Bantuan alat tangkap yaitu berupa jaring monofilamen dan multifilamen, serta jaring *gillnet* dan pancing *long line* (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 18). Pengadaan alat tangkap tersebut tidak diberikan kepada nelayan secara pribadi, karena jumlah alat tangkap yang diadakan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah masyarakat nelayan yang ada di Muncar. Sehingga agar lebih efektif, pengadaan alat tangkap tersebut diperuntukkan kepada kelompok-kelompok nelayan Muncar yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai modal untuk dikelola dan digunakan bersama (wawancara dengan Anang, tanggal 30 Juli 2019).

Pada tahun 2012, pengadaan sarana penangkap ikan juga kembali dilaksanakan dengan pengadaan 1 unit kapal *fiberglass* 30 GT. Kapal tersebut diserahkan kepada 1 kelompok nelayan yaitu Kelompok Mina Candra Buana yang berasal dari Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Adapun dampak yang diharapkan dari kegiatan pengadaan perahu tersebut ialah terjadinya alih tangkap nelayan dari lokasi perairan Selat Bali menjadi ke wilayah Samudra Indonesia (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2012: 45).

Kemudian pada tahun 2013, pengadaan sarana penangkap ikan untuk di wilayah Kecamatan Muncar tidak dilaksanakan. Namun pada tahun 2014 kembali dilakukan kegiatan motorisasi armada, dengan memberikan bantuan sarana penangkap ikan berupa mesin perahu sebanyak 6 unit. Pengadaan mesin perahu, diperuntukkan bagi 6 kelompok nelayan di Kecamatan Muncar. Dengan bantuan tersebut diharapkan para nelayan kecil bisa melakukan penangkapan ikan di area yang lebih jauh (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2014: 47).

5. Pengadaan Sarana untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sarana TPI diadakan guna menunjang seluruh kegiatan di TPI. Kegiatan pengadaan sarana TPI perlu dilakukan karena pada tahun 2011 mekanisme TPI belum berjalan secara sempurna karena keterbatasan sarana dan prasarana TPI (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 50). Sebagai bagian dari implementasi program minapolitan, kegiatan pengadaan sarana TPI telah dilakukan dengan pengadaan sarana timbangan untuk memperlancar kegiatan di TPI. Timbangan merupakan peralatan yang sangat penting yang digunakan sebagai alat untuk menimbang hasil tangkapan ikan sebelum dilakukannya pelelangan. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, kegiatan pengadaan sarana timbangan telah dilaksanakan pada tahun 2014. Pengadaan timbangan, setiap tahun terus dilaksanakan secara bertahap karena timbangan yang digunakan mudah rusak sehingga harus segera diganti dengan timbangan yang baru. Biasanya, untuk di kawasan TPI Muncar pengadaan sarana timbangan akan di realisasikan apabila ada pengajuan. Pengajuan tersebut dilakukan apabila fasilitas timbangan yang tersedia di TPI kondisinya mengalami kerusakan (wawancara dengan Widi, tanggal 25 Juli 2019; Edi, tanggal 23 Juli 2019).

5.3 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan pemegang peran penting dalam suatu proses pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) juga berperan lebih menonjol jika dibandingkan dengan modal fisik dalam proses kegiatan pembangunan ekonomi (Umar, 2013: 77). Sebagai program pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan tentunya peningkatan SDM diperlukan sebagai bagian implementasi dari program minapolitan. Beberapa kegiatan peningkatan SDM dalam implementasi program minapolitan yaitu meliputi kegiatan pemberdayaan nelayan dan pemberdayaan UMKM. Kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat nelayan dan pelaku UMKM, merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan karena keduanya melibatkan anggota keluarga nelayan dimana untuk kegiatan UMKM lebih melibatkan para ibu-ibu atau istri

nelayan. Adapun tujuan dari kegiatan pemberdayaan yaitu untuk menjadikan masyarakat agar lebih mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki (Widjajanti, 2011: 16).

1. Pemberdayaan Nelayan

Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kegiatan pembinaan kepada para kelompok nelayan perikanan tangkap. Pelaksanaan pembinaan pada kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada Keputusan Kapusluh KP No. 013/BPSDM-KP.04/KP.350/VIII/2011 tentang Pengangkatan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011, dan SK PPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Proinsi Jawa Timur No. 52/SK/APBN-3/III/2011 tentang Penunjukan Tenaga Kerja Pendampingan PUMP Bidang Perikanan Tangkap 2011. Berdasarkan Kapusluh dan surat keputusan tersebut, pada tahun 2011 telah dilaksanakan pembinaan terhadap sebagian kelompok nelayan yang terdapat di Kecamatan Muncar. Pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi diantaranya yaitu: (a) pembinaan tentang organisasi dan pembentukan kelompok; (b) pembinaan tentang administrasi Kelompok Usaha Bersama (KUB); (c) pembinaan untuk meningkatkan pemahaman penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan berupa pancing, jaring, rumpon, dll.; (d) penyuluhan dan pembinaan tentang potensi sumber daya ikan yang terbatas; (e) penyuluhan dan pembinaan tentang penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan; (f) penyuluhan dan pembinaan masyarakat untuk pembentukan kawasan konservasi laut dan pantai (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 55; 2012: 100; 2013: 108; 2014: 111).

Disisi lain untuk menghindari adanya *illegal fishing* para nelayan juga diwajibkan untuk memiliki surat perizinan. Perizinan merupakan salah satu upaya yang memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan. Perizinan juga dapat digunakan sebagai alat penertiban dan sebagai kontrol dalam upaya perusahaan perikanan, caranya ialah dengan memonitor, membatasi serta mengawasi usaha-usaha dibidang kelautan dan perikanan (Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2010: 42). Apabila nelayan tidak memiliki surat izin maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan melaut. Fasilitas surat-surat perizinan yang wajib dimiliki nelayan yaitu meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Sedangkan SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Kemudian untuk SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14/MEN/2011). Ketiga surat izin tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam sistem pengurusan surat izin tersebut dilaksanakan secara bertahap, artinya untuk mendapatkan SIPI harus melakukan pengurusan terhadap SIUP terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pengurusan SIKPI. Untuk SIUP memiliki masa berlaku selamanya, sedangkan SIPI hanya berlaku selama 3 tahun. Selain SIUP, SIPI dan SIKPI ada pula Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar (wawancara dengan Umar, tanggal 31 Juli 2019). Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan (Undang-undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009). Sebelum memberikan SPB syahbandar perlu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen kapal dan kelengkapan lainnya, jika tidak terdapat suatu hal yang bersifat pelanggaran atau terdapat adanya kekurangan pada kapal, maka surat ijin berlayar tidak dapat diberikan kepada Nahkoda (Sari, 2014: 4).

Dengan adanya surat-surat ijin yang wajib dimiliki, diharapkan semua pelaku usaha perikanan khususnya nelayan tidak masuk daftar *illegal fishing* karena masalah kepemilikan surat perijinan yang tidak diurus. Untuk menghindari ketidak tertiban masalah perijinan, maka pihak Dinas Perikanan mendatangi langsung

lokasi untuk melakukan sosialisasi dan membuka gerai untuk melayani masyarakat. Hasil dari kegiatan membuka gerai tersebut menjadikan masyarakat nelayan yang belum melakukan pengurusan surat ijin, secara sadar mau mendatangi gerai untuk mengurus perijinan yang harus dimiliki. Selain itu, dengan adanya fasilitas perijinan diharapkan nelayan masuk kepelabuhan untuk melakukan pendaratan ikan di TPI, karena kesadaran masyarakat nelayan untuk memanfaatkan TPI masih rendah (wawancara dengan Widi, tanggal 25 Juli 2019).

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata karena setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya (Khamarullah *et al.*, 2014: 593). Kegiatan pemberdayaan UMKM menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu bertujuan untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Mengingat program minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan berbasis kawasan, sehingga dalam implementasinya, pemberdayaan UMKM di sekitar kawasan minapolitan Muncar dilaksanakan guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan pesisir dengan berbagai kegiatan pelatihan usaha.

Kegiatan UMKM pada dasarnya terdiri dari kegiatan pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Pada setiap usaha pengolahan dan pemasaran, upaya pengoptimalan produk sangat penting agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberian bantuan modal kepada pelaku usaha UMKM. Pelaksanaan pembinaan pada kelompok UMKM atau biasa disebut dengan POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar) di Kabupaten Banyuwangi di dasarkan pada Kep. Dirjen P2HP No. 2 Kep.072/Dj-P2HP/2011 tentang Pendampingan PUMP-P2HP, Keputusan Kapusluh KP No. 004/BPSDM-KP.04/KP.350/II/2011 tentang Pengangkaan Penyuluh Perikanan

Tenaga Kontrak (PPTK) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 sebagai Tenaga Pendamping PUMP-P2HP Tahun 2011, dan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur No. 532/1301/116.05/2011 tentang verifikasi dan monev kegiatan.

Kegiatan pembinaan telah dilaksanakan disepanjang tahun 2011 hingga 2014 terhadap kelompok pengolah hasil perikanan yang tersebar di 10 wilayah Kecamatan, salah satu diantaranya yaitu Kecamatan Muncar. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, pada kurun waktu 2011 kegiatan pembinaan telah dilaksanakan terhadap 3 kelompok, tahun 2012 telah dilaksanakan pembinaan terhadap 11 kelompok, tahun 2013 kegiatan pembinaan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 25 kelompok, dan pada tahun 2014 kembali menurun sebanyak 11 kelompok.

Macam-macam kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 hingga 2014 antara lain: (a) pembinaan tentang organisasi dan pembentukan kelompok, (b) pembinaan tentang administrasi kelompok; (c) penyuluhan pengembangan kualitas kelompok; (d) pelatihan teknis pengolahan dan pelatihan manajemen kewirausahaan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2011: 57; 2012: 101; 2014: 112). Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat yang belum memiliki atau belum tergabung dalam kelompok pengolah ikan. Namun, apabila telah terbentuk kelompok maka kegiatan yang akan dilaksanakan ialah tentang pelatihan teknis pengolahan. Pada pelatihan tersebut, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok pengolah dalam melakukan pengelolaan dan teknik pengolahan hasil perikanan. Pada kegiatan ini, dilaksanakan dengan cara memberikan latihan, demonstrasi dan juga penyuluhan serta diversifikasi pengolahan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2014: 104). Dengan pelatihan tersebut, maka para peserta pelatihan akan mampu membuat olahan secara higienis, baik dari segi proses pembuatan maupun pengemasannya.

Kegiatan pemberdayaan banyak diikuti oleh para ibu-ibu atau istri nelayan setempat, tujuannya ialah agar para istri nelayan tidak hanya mengandalkan penghasilan suami yang hasil melautnya tidak menentu, sehingga mereka dapat

membantu perekonomian keluarga. Kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, kemudian dipraktekkan secara langsung oleh ibu-ibu nelayan, sehingga mereka dengan mudah dapat memahami cara membuat berbagai olahan ikan yang baik dan benar (wawancara dengan Umar, tanggal 16 Juli 2019).



BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Program minapolitan telah diterapkan di kawasan Muncar sejak tahun 2010. Adapun faktor yang melatar belakangi penerapan program minapolitan di kawasan Muncar yaitu, adanya program pemerintah mengenai pelaksanaan minapolitan, letaknya yang geografis karena terdapat kemudahan akses jalan untuk transportasi, mempunyai akses terhadap pengadaan bahan baku berupa hasil produksi perikanan, dan memiliki kawasan yang secara alami cocok untuk kegiatan usaha perikanan karena lokasinya yang dekat dengan *fishing ground*. Kedua, memiliki komoditas unggulan bidang perikanan yang jumlahnya melimpah dengan nilai ekonomi tinggi karena turut didukung oleh pelaku utama usaha perikanan yang sebagian besar adalah penduduk di kawasan pesisir Muncar. Ketiga, ketersediaan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan produksi hasil tangkapan ikan, aksesibilitas terhadap pasar seperti bantuan permodalan, keberadaan lembaga-lembaga usaha yang juga diberikan fasilitas berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

Implementasi program minapolitan telah dilaksanakan dengan 3 kelompok kegiatan minapolitan berbasis perikanan tangkap, diantaranya yaitu: (1) pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana meliputi tanggul, instalasi air bersih, drainase dan penerangan, yang mampu memberikan pelayanan untuk mendukung kegiatan masyarakat sekitar kawasan Minapolitan; (2) pembangunan perikanan dengan melaksanakan kegiatan operasi penertiban perairan Selat Bali secara berkelanjutan, kegiatan penanaman mangrove yang turut melibatkan masyarakat, restocking SDI dengan melakukan pelepasan benih ikan, pengadaan alat tangkap untuk nelayan dan pengadaan sarana TPI untuk memperlancar kegiatan perikanan di kawasan minapolitan Muncar; (3) program peningkatan sumber daya manusai (SDM), berupa kegiatan pemberdayaan yang diperuntukkan bagi para nelayan dan pemberdayaan UMKM yang diperuntukkan bagi para istri

nelayan Muncar melalui kegiatan pelatihan pengolahan ikan menjadi berbagai olahan makanan.

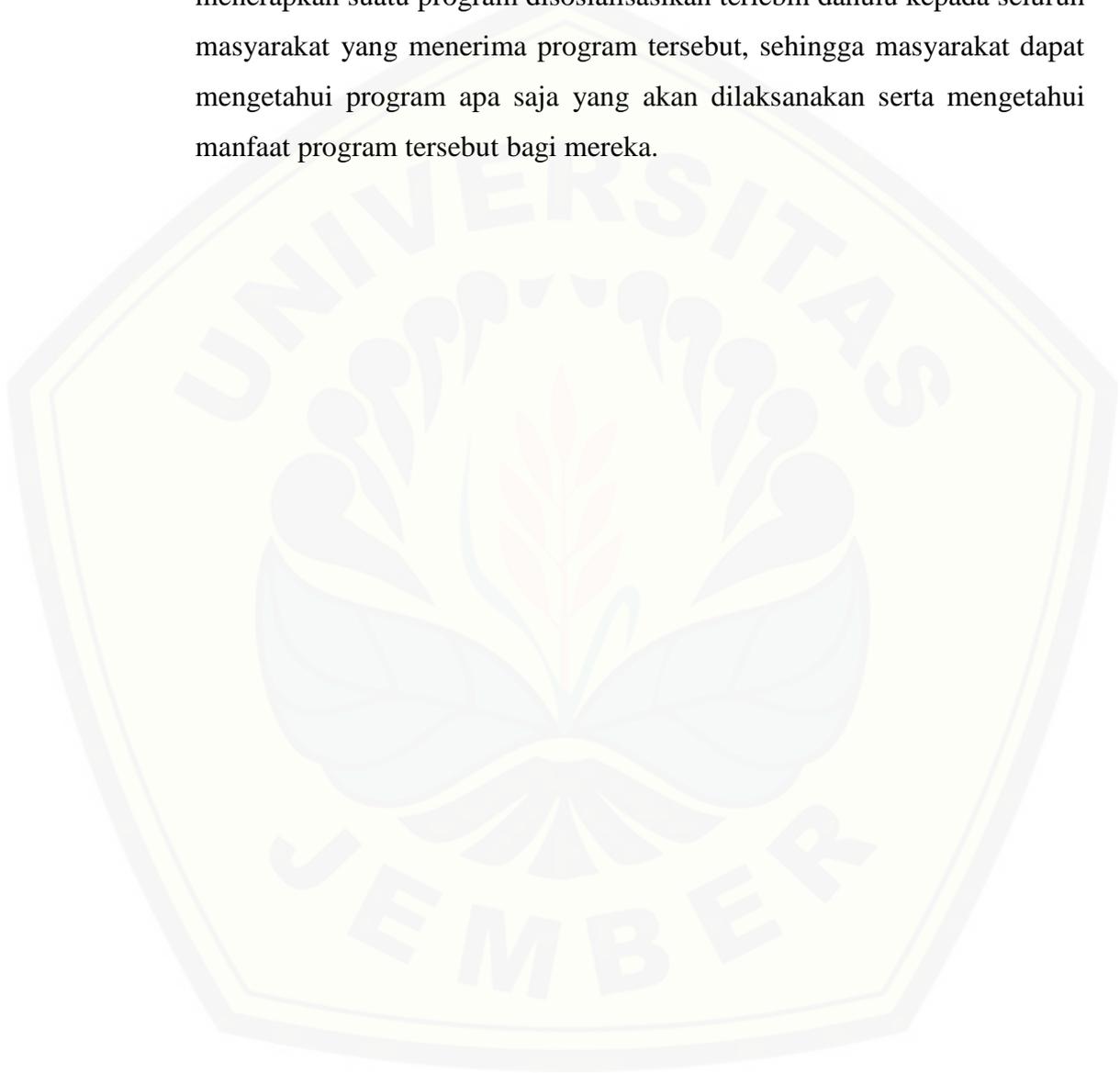
Adapun dampak implementasi program minapolitan bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar yaitu meliputi tingkat SDM dan tingkat pendapatan. Program peningkatan SDM yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan SDM masyarakat nelayan Muncar. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah KUB nelayan yang terjadi setiap tahun. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan UMKM turut memberikan dampak positif terhadap pengetahuan tentang cara membuat olahan ikan yang kemudian dapat dipasarkan. Selanjutnya, jika dilihat dari tingkat pendapatan nelayan, implementasi program minapolitan pada tahun 2010 hingga 2013 belum terlihat dampaknya, karena tahun tersebut masih pada tahap persiapan dan pelaksanaan. Namun, pada tahun 2014 mulai terlihat dampaknya karena produksi ikan pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang cukup drastis. Disisi lain, pembangunan infrastruktur minapolitan juga telah memberikan dampak positif bagi kelancaran aktivitas para nelayan sehingga turut berpengaruh pula pada tingkat pendapatan nelayan Muncar. Sementara itu untuk pelaku usaha UMKM, implementasi program minapolitan juga turut memberikan dampak bagi pendapatan istri nelayan Muncar. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan memproduksi olahan makanan berbahan baku ikan, dengan penghasilan sebesar Rp 600.000 hingga Rp 2.000.000/bulan, sehingga mereka mampu membantu perekonomian keluarga.

7.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya;

2. Bagi masyarakat Muncar, diharapkan selalu mentaati peraturan yang ada dan ikut serta dalam menjaga ekosistem laut dengan tidak menggunakan alat tangkap yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan;
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebaiknya ketika akan menerapkan suatu program disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat yang menerima program tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan serta mengetahui manfaat program tersebut bagi mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ardiyansyah, A. 2016. "Pengelolaan Hutan Mangrove Ditinjau dari Sosial Ekologi di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Cahyaningrum, S. Y. 2011. Sarden Kalengan Pun Tak Lagi Berasal dari Muncar. <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/12/16/04034190/Sarden.Kalengan.Pun.Tak.Lagi.Berasal.dari.Muncar?page=all> [17 Oktober 2019].
- Cahyaningrum, S. Y. 2013. Nelayan Muncar Terjerat Konsumerisme. <https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=99370863> [30 Juli 2019].
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 2011. *Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 2010. *Laporan Tahunan 2010*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 2011. *Laporan Tahunan 2011*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 2012. *Laporan Tahunan 2012*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 2013. *Laporan Tahunan 2013*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 2014. *Laporan Tahunan 2014*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Eri. 2014. Pemprov Jatim Benahi Infrastruktur Pelabuhan Perikanan untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan. <http://kabargress.com/2014/06/25/pemprov-jatim-benahi-infrastruktur-pelabuhan-perikanan-untuk-tingkatkan-produktivitas-nelayan/> [4 Agustus 2019].
- Fitriana, R. 2014. "Studi Komparasi Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku Jalan Tol Menggunakan Metode Bina Marga 2002 dan Aashto 1993 (Studi Kasus: Ruas Jalan Tol Solo-Kertosono)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1985. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Harahap, A. R., dan Pribadi, D. W. 2009. Pelabuhan Muncar: Produsen Ikan Tanpa Jeda. <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/04/27/18290566/pelabuhan.muncar.produsen.ikan.tanpa.jeda> [27 Juni 2019].
- Hijriani, P. R. 2018. "Program Minapolitan pada Perkembangan Perikanan Tambak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2015". *e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6 (1): 157-165.
- Hiariey, L. S., dan Romeon, N. R. 2017. "Penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (Studi Kasus Desa Latuhalat, Kota Ambon, Propinsi Maluku)". *Jurnal Matematika, Saint, dan Teknologi*, Vol. 18 (2): 68-77.
- Imron, M., Nurkayah, R., dan Purwangka, F. 2017. "Pengetahuan dan Keterampilan Nelayan tentang Keselamatan Kerja di PPP Muncar Banyuwangi". *Jurnal Albacore*, Vol. 1 (1): 99-109.
- Jamilah dan Mawardati. 2018. *Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Joesidawati, M. I., Purwanto, dan Asriyanto. 2005. "Alternatif Pengelolaan Perikanan Lemuru di Selat Bali". *Jurnal Pasir Laut*, Vol. 1 (1): 1-18.
- Kamil, I. Tanpa Tahun. *Revolusi Biru Dan Human Security Nelayan di Muncar Banyuwangi*. <http://insankamil.id/revolusi-biru-dan-human-security-nelayan-di-muncar-banyuwangi/> [10 Februari 2019].
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2012. *Agropolitan & Minapolitan: Konsep Menuju Keharmonian*. Jakarta: Dirjen Cipta Karya.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan*. Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan*. Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan*. Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi: Bupati Banyuwangi.

Khamarullah, A., Gani, A. J. A., & Riyanto. 2014. "Strategi Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 (4): 591-596.

Lavenia, T. 2015. "Penilaian Depresiasi Sumberdaya Ikan Lemuru dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Nelayan sebagai Bahan Pertimbangan Rekomendasi Kebijakan Perikanan (Studi Kasus: Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Lubis, E., Nugroho, T., dan Witry, S.D.B. 2013. "Produksi Hasil Tangkapan sebagai Bahan Baku Industri Pengolahan: Kasus Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Buletin PSP*, Vol. 21 (1): 77-95.

Mira. 2007. "Efisiensi Ekonomi dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Penangkapan Lemuru di Muncar, Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 (2): 141-147.

Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ningtyas, I. 2010. Pelabuhan Muncar Dibidik Jadi Kawasan Minapolitan. <https://bisnis.tempo.co/read/242068/pelabuhan-muncar-dibidik-jadi-kawasan-minapolitan/full&view=ok> [19 April 2019].

Ningtyas, I. 2014. Jeritan Nelayan Muncar Dihantam Cuaca Buruk. <https://nasional.tempo.co/read/552942/jeritan-nelayan-muncar-dihantam-cuaca-buruk/full&view=ok> [19 Oktober 2019].

Novrianti. 2017. "Pengaruh Drainase terhadap Lingkungan Jalan Mendawai dan sekitar Pasar Kahayan". *Jurnal Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol. 2 (1): 31-36.

Oktama, R. Z. 2013. "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Keluarga Nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2013". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Pamungkas, W.P. 2013. "Implikasi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pesisir atas Turunnya Hasil Tangkapan Lemuru (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Muncar Kabupaten Banyuwangi)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1 (2): 1-27.

Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2007. *Laporan Tahunan 2007: Data Produksi Perjenis Ikan*. Muncar: UPT PPP Muncar.

- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2008. *Laporan Tahunan 2008: Data Produksi Perjenis Ikan*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2009. *Laporan Tahunan 2009: Data Produksi Perjenis Ikan*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2015. Pemerintah Bangun BLK dengan 9 Keahlian di Banyuwangi. <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/pemerintah-bangun-blk-dengan-9-keahlian-di-banyuwangi.html> [24 Juli 2019].
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap*. Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Perkasa, T., Wijayanto, D., & Fitri, A.D.P. 2016. “Analisis Produktivitas Purse Seine Gardan dan Purse Seine Slerek dengan Fishing Base di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur”. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Vol. 5 (1): 102-110.
- Purwati, M. Y. 2016. “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Raharja, A. B., Widigdo, B., dan Sutrisno, D. 2014. “Kajian Potensi Kawasan Mangrove di Kawasan Pesisir Teluk Pangpang Banyuwangi”. *Jurnal Depik*, Vol. 3 (1): 36-45.
- Rosana, N., dan Prasita, V. D. 2016. *Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Jawa Timur Berbasis Spasial*. Surabaya: UHT Press.
- Sa’adah, N. H. 2015. “Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Dampaknya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan 2010-2014”. *Skripsi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sari, J.P. 2014. “Pengawasan Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilahan”. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 1 (2): 1-15.
- Setiyono dan Yudo, S. 2008. “Potensi Pencemaran dari Limbah Cair Industri Pengolahan Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Air Indonesia*, Vol. 4 (2): 136-145.
- Simbolon, D., Wiryawan, B., Wahyuningrum, P. I., dan Wahyudi, H. 2011. “Tingkat Pemanfaatan Dan Pola Musim Penangkapan Ikan Lemuru Di Perairan Selat Bali”. *Jurnal Buletin PSP*, Vol. XIX (3): 293-307.

- Sukidin. 2007. *Sosiologi Ekonomi*. Jember: Center for Society Studies (CSS).
- Syahdan. 2018. “Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pelayanan Publik Studi pada Kantor Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan”. *Skripsi*. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Umar, K. 2013. “Analisis Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap (Studi Kasus Pesisir Perikanan Muncar Kabupaten Banyuwangi)”. *Tesis*. Surabaya: Universitas Hang Tuah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.
- Undang-Undang republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. *Perikanan*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Jakarta.
- UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar. 2009. *Laporan Tahunan Tahun 2009*. Muncar: UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar.
- UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar. 2014. *Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar Tahun 2014*. UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar.
- Utami, R. W., Wagistina, S., dan Wibowo, B. S. Tanpa Tahun. Pembangunan Minapolis dan Hinterland Kawasan Minapolitan. <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel80135EA3582CCBB59A9318CD26BC47A0.pdf> [22 Juni 2019].
- Warsilan dan Noor, A. 2015. “Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda”. *Jurnal Mimbar*, Vol. 31 (2): 359-366.
- Wiadnya, D. G. R. 2011. Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah. http://wiadnyadgr.lecture.ub.ac.id/files/2012/02/UNIBRAW-FPIK-KonsepPerencanaanMinapolitan_22November2011.pdf [12 Februari 2019].
- Widjaja, S. 2013. *Pengembangan Kawasan Minapolitan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Widjajanti, K. 2011. "Model Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 (1): 15-27.
- Wijaya, R. A., dan Koeshendrajana, S. 2009. Kajian *Excess Capacity* Pengelolaan Perikanan Lemuru di Selat Bali. https://www.researchgate.net/profile/Rizki_Wijaya5/publication/309703220_Excess_capacity_study_on_Management_of_Lemuru_Fishery_in_The_Bali_Strait/links/581d5f7d08aea429b29220c7.pdf [24 Juni 2019].
- Yagus. 2015. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau". *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 3 (1): 222-233.



LAMPIRAN 1. MATRIKS PENELITIAN

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Sosial Ekonomi	Program Minapolitan dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014	Metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi	1. Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah. 2. Sifat penelitian: Penelitian Pustaka dan Penelitian Lapang.	1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi program minapolitan diterapkan di Kecamatan Muncar tahun 2010? 2. Bagaimanakah implementasi program minapolitan di Kecamatan Muncar tahun 2010-2014? 3. Bagaimanakah dampak program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar tahun 2010-2014?	1. Arsip milik UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar. 2. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. 3. UPT Perpustakaan Universitas Jember. 4. Koleksi Pribadi. 5. Wawancara. 6. Observasi.

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA**PEDOMAN WAWANCARA**

No.	Hal-hal yang Diwawancarakan	Informan
1.	<p>Latar belakang penerapan program minapolitan di Kecamatan Muncar tahun 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor yang mendasari penetapan lokasi minapolitan di Muncar • Faktor yang mendasari Muncar di jadikan sebagai zona inti kawasan minapolitan 	Widi, Anang, Edi, Umar, Rini
2.	<p>Implementasi program minapolitan di minapolitan di Kecamatan Muncar tahun 2010-2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi program pembangunan perikanan di Kecamatan Muncar • Implementasi program pembangunan infrastruktur di wilayah operasional pelabuhan Muncar • Implementasi program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi nelayan Muncar 	Widi, Anang, Edi, Umar
3.	<p>Dampak program minapolitan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Muncar tahun 2010-2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dampak program minapolitan terhadap tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) • Dampak program minapolitan terhadap tingkat pendapatan masyarakat nelayan 	Hasan, Paiman, Riyaman, Heriyanto, Astutik, Komariah.

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi dan UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar.

- 1) Faktor apakah yang melatar belakangi penerapan program minapolitan di Kecamatan Muncar?
- 2) Mengapa kecamatan Muncar dijadikan sebagai zona inti kawasan minapolitan?
- 3) Bagaimanakah implementasi program minapolitan di wilayah Muncar? Yang meliputi kegiatan program pembangunan perikanan, program pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Muncar.
- 4) Adakah kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan?
- 5) Jika ada (terkait nomor 4) mengapa belum berhasil dilaksanakan?
- 6) Bagaimanakah dampak implementasi program minapolitan terhadap tingkat pendapatan masyarakat nelayan Muncar?
- 7) Bagaimanakah dampak implementasi program minapolitan terhadap tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat nelayan Muncar?

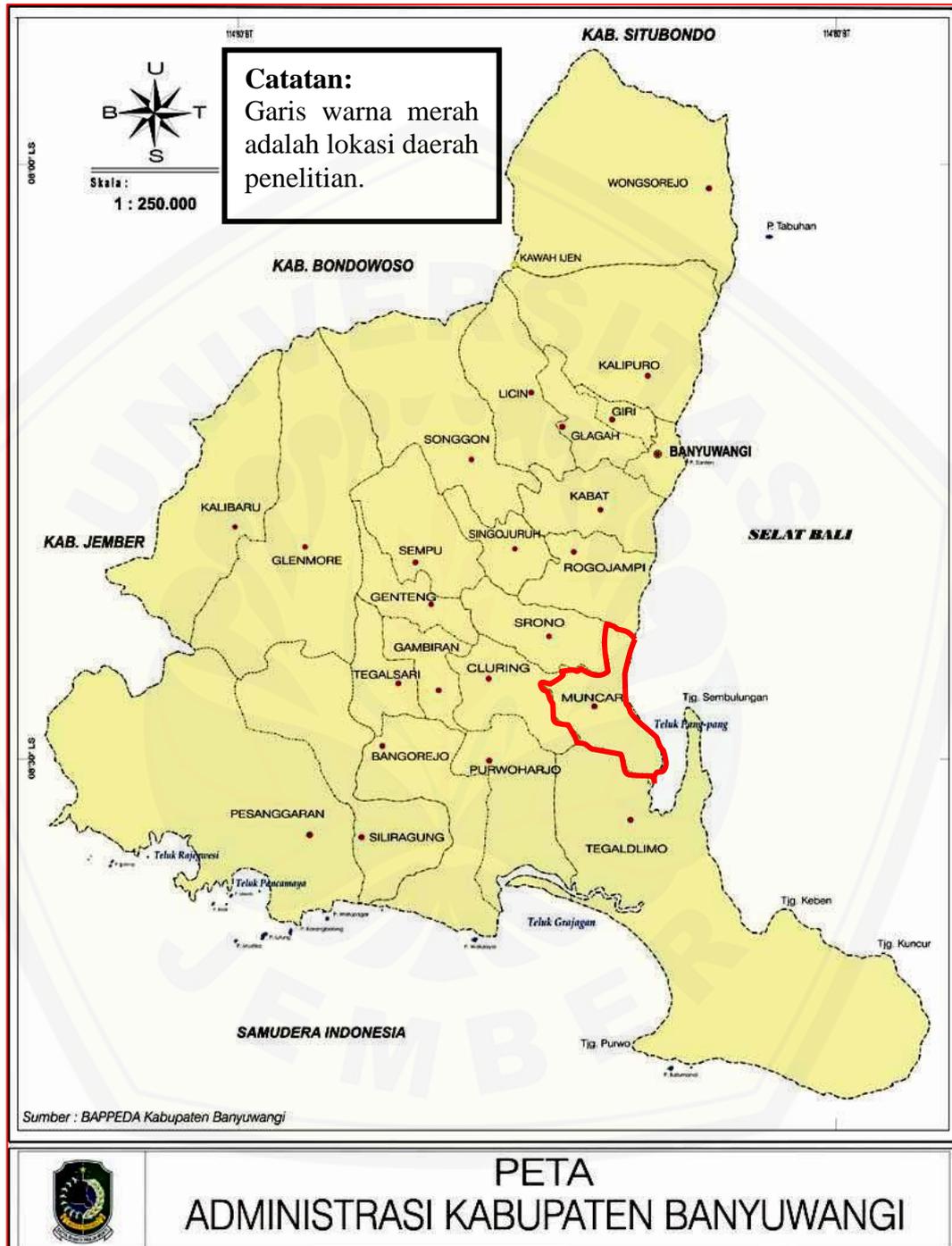
2. Masyarakat Nelayan

- 1) Apakah anda mengetahui tentang program minapolitan yang diterapkan di Muncar sejak tahun 2010?
- 2) Bagaimanakah pendapatan nelayan pada periode tahun 2010-2014?
- 3) Apakah pada periode tahun 2010-2014 anda pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan?
- 4) Jika pernah (terkait pertanyaan nomor 2) kegiatan apa saja yang pernah diikuti? dan seperti apa kegiatannya?
- 5) Bagaimanakah manfaat kegiatan pemberdayaan tersebut bagi anda?

3. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan

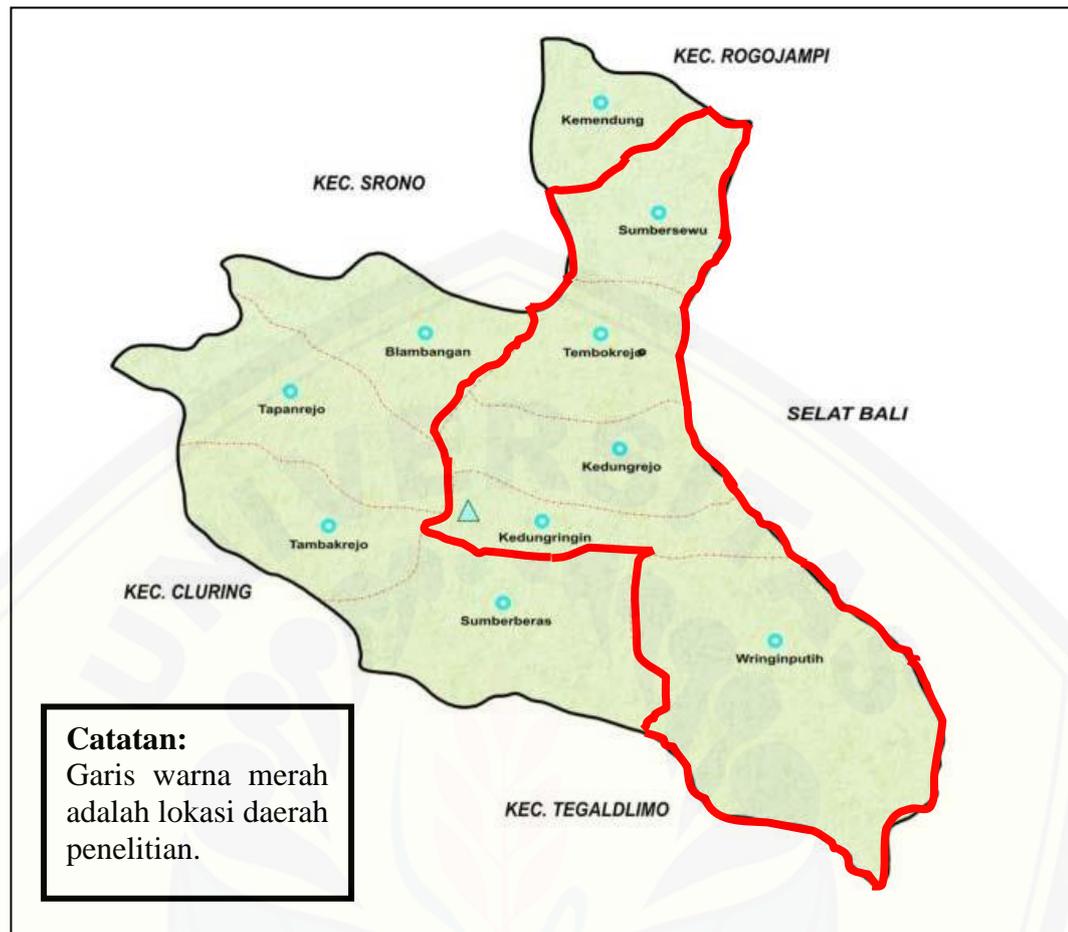
- 1) Apa nama kelompok usaha anda?

- 2) Bidang pengolahan apa yang dijalankan?
- 3) Apa yang melatar belakangi didirikannya kelompok usaha tersebut?
- 4) Apakah pada periode tahun 2010-2014 pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan UMKM?
- 5) Jika pernah (terkait pertanyaan nomor 4), pelatihan apa saja yang pernah diikuti? Dan seperti apa kegiatannya?
- 6) Bagaimanakah manfaat kegiatan pemberdayaan tersebut?
- 7) Bagaimanakah dampak kegiatan pemberdayaan tersebut terhadap pendapatan anda?
- 8) Bagaimanakah kondisi perekonomian anda sebelum tergabung dalam kelompok dan mengikuti kegiatan pemberdayaan?
- 9) Bagaimana tanggapan anda tentang pemberdayaan UMKM yang telah diberikan?

LAMPIRAN 3. PETA KABUPATEN BANYUWANGI DAN KECAMATAN MUNCAR

Gambar 3.1a Peta Kabupaten Banyuwangi

(Sumber: Laporan Akhir RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten. Banyuwangi, halaman II-2)



Gambar 3.1b Peta Kecamatan Muncar

*(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar
Dalam Angka 2014, halaman iv)*

LAMPIRAN. 4 DAFTAR INFORMAN

Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat
Kartono Umar, S.Pi., M.AP.	53 Tahun	Kepala PPP Muncar	Perumahan Beluru Permai, Kab. Sidoarjo
Untung Widiarto, SP.	58 Tahun	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi
Anang Budi Wasono, ST.	43 Tahun	Kasi Sarana Penangkap Ikan dan Pengelolaan SDI	Kel. Bakungan, Kec. Glagah, Kab. Bayuwangi
Edi Widianoro	47 Tahun	Kasi Kenelayanan	Ds. Kebaman, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi
Indah Setyo Rini, S.Pi	53 Tahun	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan	Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
Hasan Basri	61 Tahun	Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)	Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
Heriyanto	50 Tahun	Pengelola Brak Pasar Ikan Muncar	Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
Paiman	45 Tahun	Nelayan	Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
Riyaman	51 Tahun	Nelayan	Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
Astutik	48 Tahun	Pengolah Petis Ikan	Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
Komariah	44 Tahun	Pengolah Kerupuk Ikan	Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi

LAMPIRAN 5. HASIL WAWANCARA

Informan 1

Nama : Kartono Umar, S.Pi., M.AP.
Usia : 53 Tahun
Pekerjaan : Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar
Alamat : Perumahan Beluru Permai, Kabupaten Sidoarjo.

Minapolitan itu merupakan program yang sifatnya terkonsentrasi mulai dari proses penangkapan ikan kemudian naik, kapal dibawa ke pelabuhan dibawa naik ke tempat pengolahan dan diproses kemudian dipasarkan. Penetapan lokasi pelabuhan perikanan jadi minapolitan itu ada 9 secara nasional, salah satunya adalah pelabuhan perikanan pantai Muncar yang ditetapkan sebagai pelabuhan minapolitan perikanan tangkap.

Muncar kalo kita lihat letak posisinya strategis, jadi posisi pelabuhan perikanan pantai Muncar berhadapan langsung dengan selat bali, kalau yang diselatan itu kan potensi tuna cakalang sama-sama jenis tuna itu sangat luar biasa cuma belum dieksplotasi secara keseluruhan, nah penangkapan ikan kita disini kan lebu ke daerah pesisir, kemudian di Selat Bali kaya dengan jenis ikan kecil misalnya lemuru, layang, tongkol, termasuk layur. Kemudian dari jumlah armada banyak, nelayan juga banyak, sekarang kan sudah 13.000 lebih, armadanya ada beberapa jenis dan ukuran 1743 unit. Kemudian potensi sumber daya alam lautnya itu kaya sumber daya ikan, kemudian potensi manusianya nelayan itu juga cukup banyak, kemudian armadanya juga cukup hebat. Kemudian minapolitan itu selain zona inti, juga punya zona penyangga, jadi Muncar sebagai zona inti minapolitan perikanan tangkap.

Muncar ini mulai dulu lemuru yang mendominasi jadi lemuru itu unik di Selat Bali ini dan tidak ada duanya, cuma ada di Selat Bali dan produksinya itu sangat luar biasa sangat banyak, itu satu hari pertahun 2007-2009 itu perhari bisa 1500 ton perhari tapi itu hanya 2-3 hari saja, setelah itu normal lagi, 100-200 ton biasa. Nah perjalanan kebelakang ini menurun, mungkin akibat dari iklim tidak menentu. Image masyarakat disini itu kalau ikan lemuru itu andalannya memang

ikan lemuru, jadi kalau tidak ada ikan lemuru dianggap itu tidak ada produksi padahal produksi ikan selain lemuru itu banyak, layang, tongkol kecil, layur banyak itu, karna tadi itu lemuru mendominasi produksi. Tapi yang paling unggul itu lemuru alasannya karena yang menumbuhkan pabrik-pabrik pengalengan sinikan penepungan berdiri semua karena lemuru, permintaan pasarnya lebih banyak, dalam perjalanannya kan sumberdaya alam itu kan bisa berkurang.

Untuk program pembangunan perikanan. *Pertama*, Operasi penertiban itu kita kan punya kapal pengawasan kalau dilihat itu ada kapal yang bagus, itu kita jadi melakukan pengawasan secara terpadu melibatkan Pol Air, AL, Dinas Perikanan Kabupaten, Propinsi, kemudian Syahbandar, termasuk HNSI, kemudian tokoh-tokoh nelayan juga kita ajak ikut biar tahu. Jadi yang kita periksa itu nanti masalah ijin-ijinnya, kemudian terkait jalur-jalur penangkapannya, kemudian termasuk pemboman pemutusan itu. Nah jadi untuk pengawasan itu dilakukan secara *continue*. *Kedua*, penanaman mangrove, jadi mangrove ini, kegiatannya itu ada juga dari kabupaten tapi paling banyak itu dari propinsi. Jadi penanaman mangrove ini penanaman pohon bakau pada dulunya memang sudah ada bakau tapi akibat ulahnya manusia mengambil atau merusak, sekarang ditanam lagi ditempat yang sama. Itu juga dilakukan setiap tahun dari propinsi ada. *Ketiga* restocking SDI, kalau dulu kan dilakukan penangkapan yang tidak ramah lingkungan misal pakai bom molotok, bom ikan itu sehingga merusak terumbu karang, kemudian jenis ikannya terus mati. Untuk memulihkan itu kita melakukan transpalantasi terumbu karang, jadi karang itu ditaruh didasar perairan yang sudah rusak jadi dia tumbuh kembali. Kemudian masyarakat disadarkan dengan adanya sosialisasi dengan penyadaran hukum itu, bahwa melakukan penangkapan dengan bom itu tidak benar, termasuk juga pemutusan untuk mengambil karang itu juga tidak boleh, merusak itu.

Selanjutnya, program pembangunan infrastruktur. *Pertama*, pembangunan infrastruktur wilayah kerja operasional pelabuhan. Untuk pembangunan infrastruktur itu, UPT hanya mengusulkan, itu nanti kita usulkan ke dinas melalui kabid tangkap setelah itu nanti dibahas kalau nanti kira-kira fasilitas mana yang akan di bangun itu kewenangannya provinsi. Kalau pas ada minapolitan kita

membangun breakwater kolam labuh ini kita nambah 20,5 hektar, kolam yang lama 5 hektar, kolam yang baru 20, hektar, break water sisi kiri maupun sisi kanan, breakwater sisi kiri itu sisi sebelah barat itu 750 meteran, kemudian sisi timurnya itu sekitar 250 meter. Jadi untuk memfasilitasi tambat labuh, karna kapal-kapal kita ini kan cukup banyak, jadi kolam kita ini sudah tidak mampu yang kolam lama yang 5 hektar itu, mangkanya kita mengusulkan untuk pembangunan itu, kan ini minapolitan tangkap, untuk berlindung saat musim gelombang-gelombang, kapal mereka bisa berlindung didalam, di kolam labuh itu. Jadi *break water* itu sifatnya untuk menahan hempasan gelombang badai, sehingga kapal-kapal nelayan yang ada di dalam kolam itu aman dari ombak. Kalau pembangunan irigasi disini kita nggak ada pengairan. Kemudian kalau drainase itu ada drainase yang didalam pelabuhan, jadi itu tempat pembuangan saluran-saluran air itu, jadi got itu kan drainase.

Untuk relokasi pemukiman, kalau di Pelabuhan tidak ada relokasi, disini kita hanya membenahan penjual itu *bakul* kita hanya rapikan, kepinggir, penataan tetapi tempatnya tidak pindah. Cuma kan dulu bangunan jelek-jelek sekarang dibangun oleh Pemerintah, jadi istilahnya merapikan fasilitas fungsional kayak macam kantin, jadi kantin itu jadi kayak model pujasera. Jadi tempatnya tidak pindah, hanya membangun permanen yang lebih baik dan lebih rapi. *Kedua*, pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan meliputi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMK Kelautan. Pembangunan BLK ini ada dari Kabupaten, untuk jurusan SMK Kelautan Perikanan itu kan menghasilkan nelayan-nelayan modern, jadi nantinya lulusan dari SMK itu secara kedepan itu menjadi nelayan-nelayan modern punya wawasan yang luas, sehingga kalau menangkap ikan itu dengan cara-cara yang benar sebab sudah ada aturan Undang-undang perikanan dan menangkap ikan tetap menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak dengan menggunakan macam bahan peledak, potassium, setrum. Kemudian mereka sedikit banyak mengenal alat-alat macam GPS untuk deteksi ikan, bisa mengatur posisi kapal dan Lintang Bujur bisa itu, lebih berkompetensi, mereka juga siap bersaing untuk dipekerjakan dengan pesaing pekerja ABK yang dari luar. *Ketiga*, Pembangunan jalan di lokasi Pusat Pengelolaan Minapolitan

(PPM). Jadi jalan ini ada kelasnya, ada yang kelas dari kabupaten ada yang dari propinsi, jadi yang dari propinsi itu yang kita benahi, yang jalan akses di depan itu, depan pabrik-pabrik itu, itu dari propinsi kita benahi, karena itu modal transportasi, kalau jalannya rusak mana ada pengusaha mau masuk kesini, kan nggak mungkin. Untuk pembangunan jalan masuk ke lokasi pusat pengembangan minapolitan ya jalan ini yang ada diluar kan ada ada jalan Provinsi ada jalan Kabupaten. Jadikan ini namanya minapolitan perikanan tangkap, sentralnya ada di pelabuhan. *Keempat*, pembangunan tempat penampungan sementara di kawasan pelabuhan. Di pelabuhan, tidak ada TPA tapi kita bekerja sama dengan desa sama kabupaten, jadi itu difasilitasi sama desa dan kabupaten dibuat, kemudian TPA kita itu dari aktivitas nelayan, pedangang kan kecil plastik-plastik itu, nanti kita kumpulkan trus dibuang keluar. Jadi khas pelabuhan itu kita menyiapkan tempat sampah kecil, nanti bekerjasama dengan Desa, nanti Desa itu yang mengambil, buangnya ke tempat pembuangan akhir di luar, jadi sifatnya sementara.

Kemudian, program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). *Pertama* pemberdayaan nelayan, Kegiatan pemberdayaan nelayan itu untuk istri nelayan, tentang bagaimana mengolah ikan lemuru menjadi nugget kah atau bakso. Kemudian pelatihan keselamatan berlayar itu disini ada, namanya itu BST, keselamatan berlayar termasuk melatih ibu-ibu nelayan untuk pengolahan, diversifikasi pengolahan. Kegiatan tersebut melibatkan para nelayan, kemudian para pengguna jasa pelabuhan ini, kemudian pengusaha diluar, industri pengolahan. Kemudian ada fasilitas perijinan bagi nelayan, ijin itu biasanya untuk kapal, kalau kapal itu ada SIUP, SIPI, kemudian itu yang dari perikanan, Dinas Kelutan dan Perikanan. Kalau dari Syahbandar itu ada surat SPB, kemudian ada surat kelayakan laut, kemudian dari Gross akte, sama pas tahunan juga, jadi kaitan dengan kapal. Kemudian ijin-ijin usaha, ijin usaha itu kan penangkapan SIPI Surat Ijin Penangkapan Ikan, kalau SIUP Sirat Ijin Usaha Penangkapan ikan. Jadi ngurusnya itu SIUP lebih dulu, ijin usahanya dulu baru baru buat ijin SIPInya. Kalau SIUP itu berlaku untuk selamanya, satu kali urus sudah untuk selamanya, kalau SIPI kan kalau dulu berlaku tiga tahun, sekarang dua tahun, sekarang satu tahun, diperpendek satu tahun sekarang. Aturan syahbandar itu kalau melaut itu

harus ada SPB (Surat Persetujuan Berlayar), itu untuk keselamatan berlayar, dibawah kekuasaan syahbandar, harus ada jaketnya ada pelampungnya, kemudian harus ada surat persetujuan berlayarnya, kemudian alat tangkapnya bagaimana, jadi bekerjasama dengan syahbandar.

Kedua pemberdayaan UMKM, pemberdayaan UMKM itu ada, cuma itukan kita selain dari kabupaten kan juga dari propinsi, jadi itu pertama istri-istri nelayan yang tidak melaut itu mereka seperti kelompok-kelompok ibu-ibu. Jadi UMKM itu macam pengolahan terasi, nugget, sosis dari ikan. Cuma itu bahannya dari ikan semua, dan itu dari propinsi termasuk dinas kabupaten juga, jadi kombinasi. Kita dari pelabuhan juga ada, sosialisasi. Kalau kita ada anggaran memang kita lakukan itu. Untuk dampaknya yang jelas itu, masyarakat merasa terbantu prasarana-prasarana yang dibangun.

Banyuwangi, 31 Juli 2019



Kartono Umar, S.Pi., M.AP.

Informan 2

Nama : Untung Widiyarto, SP
Usia : 58 Tahun
Pekerjaan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Alamat : Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi.

Minapolitan itu dalam suatu kawasan terdiri dari pengolahan, pasar, & sarana pendukung. Muncar adalah Zona inti, jadi di SK itu berbunyi “Zona inti minapolitan ada di Muncar”, jadi zona inti Muncar, zona *hinterland* Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Pendukung produksi adalah Grajakan Kecamatan Purwoharjo dan Pancer Kecamatan Pesanggaran.

Kemudian program minapolitan, keterkaitannya dengan pembangunan itu mensupport seluruh kegiatan untuk mensukseskan minapolitan, contohnya dari perikanan banyak, kalau infrastrukturnya peningkatan pelabuhan Muncar dari PPI (Pusat Pendaratan Ikan) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai. Terus kita juga membuat, kan rencananya kawasan ya, walaupun sampai sekarang belum selesai masih terpotong-potong satelit, rencananya Muncar itu ada jalan lintas timur Muncar ke selatan. Terus pembangunan pasar ikan Muncar, penambahan SPDN yang dulu Cuma 1 dibangun tambah lagi jadi 2 unit terletak di sebelah UPT dan di pasar brak. Peningkatan SDM berbentuk pelatihan-pelatihan, pelatihan kelembagaan, pelatihan keterampilan, keterampilan menangkap ikan, keterampilan nautika, teknik mesin, dari kita hampir setiap tahun ada sampai sekarang. Terus dari Tim Pangan itu ada pelatihan pengolahan bermacam-macam berganti setiap tahun ada. Terus dalam rangka peningkatan konservasi perlindungan kita melakukan, mendorong masyarakat di Muncar dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan konservasi, caranya dengan menenggelamkan terumbu karang buatan. Terus dengan pihak lain program minapolitan juga melayani dilatih oleh Bakamla, Pol Air, lembaga-lembaga lain tentang keselamatan nelayan. Terus provinsi juga ada fasilitasi perijinan, dari kabupaten ada fasilitasi tentang perizinan kapal, sehingga diharapkan semua pelaku usaha perikanan khususnya pelaku utama nelayan itu tidak masuk daftar *illegal fishing* karena

masalah surat-surat yang tidak diurus, trus biar terdata itu diharapkan nelayan masuk mendaratkan ikan melalui pelabuhan di TPI.

Adapula kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja operasional pelabuhan yang meliputi tanggul, irigasi, relokasi pemukiman (sosialisasi/pengadaan tanah), drainase, penerangan (pemukiman), drainase (pemukiman), itu sudah dikerjakan 100%. Untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas pendidikan seperti BLK dan SMK Kelautan itu ada, dilakukan oleh pihak lain itu ada, disana ada SMK Kelautan perikanan, kalau BLK itu yang ada di Tembokrejo. SMK jurusan kelautan ada di sumberberas, yang menyediakan jurusan tentang perikanan. Jadi siswa diberikan ilmu pengetahuan tentang perikanan, kemudian pengetahuan cara menangkap ikan yang baik dan cara penanganan hasil tangkapan agar kesegarannya tetap terjaga. Kalau pembangunan jalan itu sudah semua, sudah selesai, karena semua infrastruktur itu semua dikeroyok, bangun Muncar itu, semua hampir dikerjakan, baik oleh swasta maupun oleh pemerintah. Lalu pembangunan TPS itu ada di Kedungrejo itu ada pengolahan sampah, kerja kroyokan itu, itu tempat penampungan, dulu di satelit ada, di brak ada, hanya nampung terus diangkut lagi.

Untuk operasi penertiban dan pengawasan perairan dan pembinaan terhadap nelayan itu ada kegiatannya dilakukan oleh pusat sama daerah, kalau sekarang oleh daerah propinsi dan pusat, tetep kalau itu, rutin itu. Kalau pembinaannya itu ada pertemuan-pertemuan dan pelatihan-pelatihan, produk yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan dan pengawasan itu munculnya banyak POKMAS Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sekarang kalau nggak salah sekitar 17 jumlahnya.

Kemudian penanaman mangrove itu terus, tahun 2010 sampai 2014 dilaksanakan dan berlanjut, dan melibatkan masyarakat, POMASnya tahun ini yang diajak kerjasama itu BARET, kalau tahun sebelumnya itu BARET sama Mina Sero Laut, terus artinya yang seperti itu berlanjut sampai sekarang. Restocking SDI itu juga sudah dilakukan, kalau untuk restocking dilaut itu kegiatannya pelepasan atau penebaran kerapu yang pernah dilakukan itu, terus bandeng juga, juga hasil kegiatan ilegal fishing itu kan dilepas liarkan sudah, dan

termasuk kegiatan restocking, benih ikan itu juga termasuk. Kemudian untuk pengadaan alat jukung itu kita setiap tahun mungkin lima-lima gitu, terus ada bantuan dari pusat tahun 2016 ada 6 unit kapal dibawah 5 GT, ada itu sudah direalisasikan. Namun, untuk pengadaan rumpon laut dangkal itu tidak dikerjakan di kawasan Muncar, adanya pengadaan rumpon laut dangkal untuk support daerah propinsi Pancer itu dilakukan 2013 kalau nggak 2014, pernah dua tahun berturut-turut, sekarang sudah enggak lagi. Kemudian pengadaan sarana TPI berupa timbangan, setiap tahun ada, tahun ini juga mengadakan yang besar 10. Dulu bertahap, kadang setiap tahun sekali, karna itu gampang rusak.

Untuk pemberdayaan nelayan dan UMKM, dikita tahun ini judulnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan, terus ada lagi Pelatihan Konservasi dan Jiwa Interpreter, tahun sebelumnya ada juga pelatihan Peningkatan Kelembagaan Kelompok, terus Konservasi. Kalau pemberdaan nelayan ada kegiatan pelatihan-pelatihan keselamatan nelayan, kalau keselamatan nelayan kemarin ada pelatihan SKK dan PST. Untuk pelatihan itu setiap tahun ada, cuma jumlahnya tidak mesti, terus juga kita ngirim ke lembaga-lembaga diluar Kabupaten, itu kita lakukan.

Artinya gini, pembinaan memang tidak boleh terputus jadi pelatihan itu harus terus kalau kelembagaan, terus diversifikasi usaha yang kita kembangkan itu diversifikasi dalam arti luas, kalau dulu ngomong diversifikasibiasanya dalam arti sempit terus ngomong diversifikasinya adalah pengolahan itu sulit berjalan di nelayan, karena nelayan pada saat waktunya longgar itu harga bahan oleh mahal, sehingga nelayan kita arahkan diversifikasinya adalah diversifikasiberusaha kepada sektor jasa dan sektor yang lain, karna nelayan itu hanya kerja 7-8 bulan, selebihnya dari itu waktu musim kurang baik itu ndak.

Kemudian hambatan program minapolitan, jadi hambatan itu dalam setiap pembangunan, kan pembangunan itu diharapkan berjalan lancar tapi pasti ada halangan, hambatan terbesar tempo hari tetkait ada kegiatan dari pembangunan yang dilakukan terkait pembangunan pengolahan limbah atau IPAL terpadu itu ditolak oleh masyarakat, dengan berbagai macam alasan kemungkinannya karena ketidakmampuan, artinya sebagian kecil orang itu menganggap kalau limbah itu

pasti berbau, paahal limbah dari ipal itu dari berbau menjadi tidak berbau, dari berbahaya menjadi tidak berbahaya, dari mengganggu menjadi tidak mengganggu, jadi karna seperti itu dihembuskan bahwa ipal itu adalah barang yang kotor karna tidak bisa dikelola. Terus hambatan yang dalam arti tidak bisa diselesaikan, hambatan bisa diselesaikan yaitu tingkat pengetahuan masyarakat tentang tertib perijinan itu rata-rata nelayan kan tidak mengurus tentang itu, sehingga kita selesaikan dengan istilah buka gerai disana, artinya kita datang di sosialisasikan, apa yang kurang, dalam waktu tertentu, dilayani, dimaksudkan dikesempatan yang lain, yang lain mau mendatangi secara sadar mandiri.

Banyuwangi, 25 Juli 2019



Untung Widiyanto, SP

Informan 3

Nama : Anang Budi Wasono, ST
Usia : 43 Tahun
Pekerjaan : Kasi Sarana Penangkap Ikan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Alamat : Kel. Bakungan, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi.

Kawasan minapolitan merupakan kawasan yang ikan mulai penangkapan sampai pengolahan, dari hulu ke hilir. Minapolitan itu sebenarnya bukan programnya dari KKP atau Dinas Perikanan dan Kelautan tapi program seluruh instansi pemerintah. Dinas Kesehatan pun dasarnya juga Minapolitan, apa lagi PU (Pekerjaan Umum) juga masuk dalam lingkup programnya minapolitan. Tapi semua itu mendukung program Minapolitan. Luar biasa itu Minapolitan, jadi minapolitan itu kan kerja bareng. Sknya itu minapolitan dimulai tahun 2010 tapi di matrik proram tahunan di mulai tahun 2012, jadi waktu itu SK dari menteri langsung turun, jadi sebenarnya minapolitan itu ada prosesnya harus ada SK kawasan baru SK Menteri turun, kalau di Banyuwangi itu enggak, langsung SK Menteri baru lainnya turun, jadi persiapan untuk *realnya* tahun 2010. Jadi pembuatan draft masterplan minapolitan itu setelah SK turun.

Faktor yang melatarbelakangi minapolitan di Muncar itu, di *background* penduduk bertumpu pada perikanan, separuh penduduk Banyuwangi itu hidupnya dari perikanan. Kalau dilihat di Muncar itu banyak orang dari berbagai daerah yang mencari ikan di Muncar. Jadi Muncar dijadikan zona inti itu karena di RTRW industri perikanan di Banyuwangi di pusatkan di Muncar. Secara keseluruhan tujuan minapolitan yang ditetapkan di Muncar sama dengan yang telah ditetapkan di SK.

Untuk pelaksanaannya itu ya seluruhnya, jadi oke KKP sebagai *leading* sektor tapi di *back up* dengan instansi lainnya seluruhnya, kesehatan, pendidikan, itu *memback up* minapolitan. Kalau di kesehatan itu muncul Minapolitan Medical Center (MMC), kemudian pendidikan itu disana ada SMK jurusan Kelautan di Desa Sumberberas, jadi pendidikan itu arahnya lebih ke maritim, ke cinta maritim,

jadi anak-anak itu mulai dikenalkan dengan laut, jadi untuk meningkatkan SDM khususnya kepedulian terhadap laut. Adapun pembangunan tanggul itu sama dengan *breakwater* itu, kalau irigasi itu saluran pembuangan yang ada di pelabuhan. Tapi sebenarnya minapolitan itu, pusatnya di Muncar trus ada daerah penyangga dan pendukung seperti Rogojampi, Srono itu. Untuk drainase itu sama, jadi kalo irigasi itu untuk sawah kalau drainase untuk pembuangan laut. Kalau penerangan sudah pasti ada itu. Kalau BLK itu ada, trus SMK kelautan yang ada di SMK DU jurusan kelautan. Untuk pembangunan jalan itu ya jalan terus, tidak pernah berhenti. Kalau tempat pembuangan sampah, di Tembok itu ada pengolahan sampah yang dikeloka PemDesnya, itu prosesnya memang lama karna ngrubah kesadaran itu tidak bisa cepat, itu ya baru jalan beberapa tahun ini.

Untuk kegiatan operasi perairan yang punya kewenangan itu propinsi sama pusat, jadi dulu tahun 2010 sampai 2016 Kabupaten masih bisa, 2016 ada Undang-undang 23 sudah tidak bisa. Pembinaan terhadap nelayan juga ada surat izinnya, jadi kalau nelayan kecil yang sampai 5 GT itu cukup PAS kecil sama Standart Daftar Kapal sekarang gratis itu, yang kapal gede itu izinnya ribet, tapi kewenangannya propinsi sama pusat. Untuk kegiatan penanaman mangrove jalan terus, itu dari propinsi sama swadaya masyarakat, jadi melibatkan masyarakat. Kemudian kegiatan restocking SDI itu setiap tahun kita, kegiatannya menebar ikan biasanya ikan kerapu. Kalau pengadaan rumpon itu di Muncar jarang. Pengadaan alat tangkap jukung setiap tahun ada, rata-rata 10 unit, bentuk perahunya kecil berukuran 5 GT kebawah, itu diperuntukkan kelompok-kelompok KUB, nggak bisa kalau bantu perorangan, bantunya ya kelompok, biar punya kas, biar bisa beli sendiri lagi. Pengadaan jukung itu dananya dari Kementrian tapi diserahkan namanya DAK (Dana Alokasi Khusus). Pengadaan sarana TPI berupa timbangan dari Pemda urusannya, ada timbangan kecil ada timbangan besar, timbangan duduk.

Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan nelayan diadakan seperti pelatihan-pelatihan keselamatan nelayan, dari kita ada dari propinsi ada dari pusat jarang. Untuk fasilitas perijinan itu dari kita ngecek alat tangkap sama perahunya. Untuk pemberdayaan koperasi sebenarnya kita itu mendorong KUB kelompok-

kelompok nelayan untuk menjadi kelompok-kelompok mendukung koperasi, kita kasi modal bantuan perahu sama mesinya, maksudnya kita itu biar untuk asetnya kelompok, jadi hasilnya itu dari kelompok kembali ke kelompok lagi, biar berkembang. Pemberdayaan UMKMnya itu kalau dari sisi tangkap ya kita kasi stimulan perahu-perahu itu ya kalau perikanan tangkap.

Hambatan di minapolitan itu koordinasi, jadi koordinasi itu gampang diucap tapi susah dilaksanakan. Cara mengatasinya ya diagendakan rapat-rapat pertemuan. Minapolitan itu untuk pembangunan bagaimanapun ya tetap berjalan, tapi gaungnya minapolitan itu sudah tidak ada. Kemudian, untuk respon masyarakat Muncar, jadi intinya masyarakat Muncar itu taunya pembangunan itu ya berjalan, nggak tau programnya itu minapolitan.

Banyuwangi, 30 Juli 2019



Anang Budi Wasono, ST

Informan 4

Nama : Edi Widianoro
Usia : 47 Tahun
Pekerjaan : Kasi Kenelayanan
Alamat : Ds. Kebaman, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi.

Program minapolitan telah ditetapkan sejak tahun 2010, namun dalam pelaksanaannya dimulai tahun 2012. Kegiatan itu pasti ada perencanaan-perencanaan dulu, rapat-rapat dulu, ada kegiatan di POKJA dulu, POKJA Minapolitan, sebelum nanti ada kegiatan yang langsung bisa diterima oleh masyarakat. Itu dua tahun itu kebanyakan ya kordinasi, rapat, kemudian mungkin desain-desainnya dibuat dan lain-lain. Tetapi sebenarnya dalam kegiatan itu kan perencanaan masuk dalam kegiatan, sudah masuk dikegiatan. Kalo orang melihat kan pasti kegiatannya, tapi perencanaan itu kan sudah masuk dalam kegiatan, kalau masyarakat melihat kegiatannya mulai tahun 2012, tapi kegiatan minapolitan dimulai perencanaan, rapat dan lain-lain itu mulai 2010.

Untuk kelompok kerja infrastruktur, yang penerangan, tanggul itu sudah dilaksanakan. Untuk tanggul laut pelengsengan itu dilaksanakan, untuk irigasi mungkin termasuk drainase-drainase masyarakat itu. Kemudian, untuk ntuk BLK sudah dibangun di Tembokrejo oleh pusat oleh Kementrian Tenaga Kerja. Fungsinya untuk pelatihan masyarakat umum bisa, lulusan-lulusan SMA bisa, tahun 2019 mulai pelatihan, jadi pembangunannya selesai tahun 2019. SMK kelautan ada di Muncar, di Kedungrejo ada, swasta itu, ada. Kalau ke saya ya, jadi Minapolitan itu kan semua dinas dilibatkan ya termasuk Dinas Perikanan pasti, Dinas PU, Pendidikan, dan Dinas-dinas yang bisa mensuport kegiatan Minapolitan. Sekarang jalan-jalan yang menuju area pesisir semua sudah bisa dilalui dengan baik, berarti semua sudah dilaksanakan. Jadi itu jalan sentra-sentra nelayan sekitar pesisir Muncar. Kemudian untuk TPS diwilayah operasional pelabuhan juga sudah dibuat.

Pada kegiatan penertiban, kalau sebelum 2015 itu kita yang menertibkan juga, jadi Dinas Perikanan biasanya melakukan operasi untuk penertiban kapal-

kapal nelayan terutama yang menyalahi aturan operasional alat tangkapnya, daerah operasi alat tangkapnya atau jenis alat tangkapnya. Tetapi setelah 2015 kewenangannya ada di propinsi, propinsi yang melakukan operasi sampai sekarang, dan pengawasan itu terus dilakukan. Untuk pembinaannya, kalau dulu ya sosialisasi mengenai alat tangkap, penggunaan alat tangkap, terus perijinan. Kalau sekarang kami pembinaannya di kelembagaan, mulai 2016 itu pembinaannya di kelembagaan dan pelatihan konservasi bagi nelayan, jadi penguatan kelembagaan nelayannya mulai 2016, kalau dibawah itu kita masih, ya sebenarnya sudah ada kelembagaan tapi kurang intens, tapi kita sering melakukan sosialisasi tentang perijinan, kemudian alat-alat tangkap yang diperbolehkan, kemudian peraturan-peraturan dari pemerintah kita laksanakan.

Kemudian penanaman mangrove itu dilaksanakan di Desa Wringinputih Muncar, juga melibatkan masyarakat. Untuk kegiatan *restocking* SDI itu penebaran bibit ikan, pernah dilakukan diperairan kayu aking, kalau dilautnya juga pernah dengan penebaran benih ikan, kepiting dan udang. Untuk pengadaan alat tangkap jukung sudah dilakukan, itu diadakan setiap tahun. Untuk pengadaan rumpon laut dangkal untuk di Muncar tidak dilaksanakan. Selanjutnya pengadaan sarana TPI itu ada, dan setiap tahun itu ada, jadi itu sudah dilakukan. Kemudian kalau pemberdayaan nelayan iya ketika sering, pemerintah daerah atau pemerintah propinsi, pusat itu kan sering melakukan BimTek untuk nelayan, kalau UMKM datanya di dinas Koperasi, itu pasti dilaksanakan. Jadi, minapolitan inikan Programnya Pusat, Muncar itu kan terkenal padat kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya termasuk pengolahan ikan, pabrik-pabrik kan banyak, jadi memang pemilihan Muncar memang karena aktivitas perekonomian sebagian besar berasal dari kegiatan perikanan.

Banyuwangi, 23 Juli 2019



Edi Widianoro

Informan 5

Nama : Indah Setyo Rini, S.Pi
Usia : 53 Tahun
Pekerjaan : Kepala Seksi Operasional Pelabuhan
Alamat : Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Kecamatan Muncar menjadi lokasi minapolitan karena lokasinya yang strategis. Di Muncar terdapat TPIkemudian lokasinya bersentuhan langsung dengantempat mencari ikan serta didukung oleh berdirinya pabrik-pabrik besar di sekitar kawasan pelabuhan. Sehingga produksi ikan itu didukung dengan adanya pabrik-pabrik tradisional maupun modern yang ada kawasan pelabuhan Muncar.

Muncar memiliki komoditas unggulan yaitu lemuru. Kalau berdasarkan urutan jumlah teratas itu ada lemuru, layang dan tongkol, tapi lemuru itu komoditas paling unggul di Muncar, karna masyarakat sini beranggapan kalau tangkapan ikan lemuru menurun itu sama seperti nggak ada ikan, padahal untuk ikan jenis lain masih ada. Ikan lemuru dikatakan komoditas unggul karena kan lemuru itu itu bisa diolah apa saja, bisa masuk ke pabrik pengalengan ikan sarden, penepungan ikan, trus minyaknya bisa untuk minyak ikan. Kalau tongkol biasanya dijual dan masuk industri pemindangan. Kalau layang, juga dijual ikan segar kemudian bisamasuk ke pabrik-pabrik pengalengan ikan. Tapi yang paling banyak permintaannya itu ikan lemuru.

Pada tahun 2010 sampai 2013 hasil tangkapan menurun kemudian 2014 naik lagi, itu faktornya banyak mbak, yang pertama karena *over fishing*, pemanasan global, jadi cuacanya panas, sehingga menjadikan ikan-ikan tidak mau lari ke perairan Muncar saking panasnya. Terus karena kondisi perairan Muncar, maksudnya ialah tidak nyaman bagi ikan-ikan dan biota laut, jadi itu dari kandungan airnya akibat pencemaran sampah dan pembuangan limbah pabrik-pabrik juga, jadi lingkungannya tidak nyaman sehingga makanan ikan itu sendiri juga ikut menghilang, sehingga ikan banyak yang lari ke daerah lain. Selain itu, faktor cuaca juga berpengaruh karena pada periode tahun tersebut musim sedang tidak stabil.

Untuk *over fishing* itu disini ialah sudah terlalu banyak yang menangkap, jadi *over fishing* itu bukan hanya di tahun 2010-2014 saja, tetapi di tahun-tahun sebelumnya penangkapannya itu besar-besaran menggunakan ukuran mata jaring yang kecil, sehingga ikan-ikan kecil ikut terjaring dan tidak punya kesempatan untuk bertumbuh besar dan berkembang biak. Selain itu, nelayan juga mempunyai kebiasaan menangkap ikan sehari lebih dari satu kali apabila hasil tangkapan sedang melimpah, namun itu dilakukan sebelum tahun 2010, sehingga pada tahun 2010-2013 mereka baru merasakan dampak penurunan produksi ikan itu sendiri. disisi lain, meskipun kegiatan operasi dan pengawasan telah dilakukan namun *over fishing* masih tetap terjadi karena memang belum dilaksanakan secara efektif. Disisi lain kan nelayan juga melakukan pengurusan surat perizinan, kita minta bukti foto alat tangkapnya, jika alat tangkapnya memenuhi persyaratan maka perizinan akan di proses. Sehingga lambat laun nelayan mulai beralih ke penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Banyuwangi, 19 Juni 2019



Indah Setyo Rini, S.Pi

Informan 6

Nama : Hasan Basri
Usia : 61 Tahun
Pekerjaan : Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
Alamat : Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Awal dari perencanaan program minapolitan itu kami mengikuti, sehingga pada tahun 2010 itu mulai dari perencanaan-perencanaan itu terus sampai dengan pelaksanaannya. Secara keseluruhan kepentingan minapolitan adalah demi kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Muncar. Awal dari pelaksanaan kami membantu mengawasi perjalanan daripada proyek minapolitan tapi pengawasannya terkait dengan dampak limbahnya, ada pengangkutan daripada material itu tidak sampai terjadi polusi yang mengganggu daripada masyarakat sekitar. Itu bentuk bantuan kami pengawasan kepada pelaksanaan minapolitan terkait dengan pengangkutan alur masuknya material itu. Tapi alhamdulillah meskipun sempat terjadi penghadangan dari masyarakat dan sebagainya, dan itu adalah proses untuk mencapai suatu kesuksesan. Alhamdulillah protes dari masyarakat masalah polusi terutama polusi bagi mobil yang membawa material itu karna sangat bersentuhan langsung dengan lingkungan masyarakat dimana disisi lain proyek itu berjalan dengan baik tapi disisi lain tetap dijaga dengan kepentingan kesehatan di masyarakat sekitar.

Pada waktu itu terdapat kegiatan pembinaan satu, itu memberitahukan adanya sosialisasi terlebih dahulu bahwa pada tahun ini ini ini, tahapan-tahapan itu, sesuai dengan dilakukan pembinaan terhadap nelayan melalui mengumpulkan nelayan, memberitahu kepada nelayan bahwa manfaat daripada pembangunan itu seperti a,b,c,d itu kewenangannya Dinas yang melakukan. Selanjutnya untuk kegiatan pemberdayaan nelayan itu dilakukan melalui pembinaan, setelah itu ada kelompok-kelompok ibu-ibu itu ada POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar) ikan. Artinya ibu-ibu itu membuat kerupuk dari ikan, jadi itu istri-istri nelayan sudah ada kelompoknya di pasar brak. Pelatihan itu rutin dilakukan sesuai

dengan jadwal Dinas Perikanan, itu pelatihannya ada pelatihan membuat pentol ikan, krupuk ikan, petis ikan. Itu termasuk pemberdayaan UMKM.

Pada kurun waktu 2010-2013 itu ada cuaca ekstrim, dan memang sumber daya ikannya menurun, entah penyebabnya sampai sekarang belum diketahui. Mangkanya banyak menerka-nerka karena penyebabnya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, trus ada karna musim, dan pada waktu itu musim cenderung menurun. Jumlah nelayan juga mengalami penurunan karena memang sumberdaya di perairan Selat Bali sudah mengurang, jadi nelayannya banyak yang beralih profesi lain, pekerjaan lain, sehingga itu menyebabkan naik turunnya dari pada jumlah nelayannya. Pada waktu itu pendapatan nelayan juga menurun, tetapi mereka tetap melaut karna pekerjaannya memang nelayan. Profesi ketika sumber daya ikan berkurang mereka ada yang kembali ke habitatnya, yang menjadi petani bertani. Jadi nelayan pesisir itu tidak semuanya hanya sebagai nelayan, ketika petani sudah mulai bertanam kan petaninya banyak yang nganggur sambil nunggu panen dia sempat ikut nelayan. Dan penurunan jumlah nelayan juga berpengaruh terhadap penurunan alat tangkapnya.

Nelayan di Muncar juga membentuk kelompok-kelompok KUB yang juga diberikan fasilitas penyuluhan supaya SDMnya meningkat. Di kelompok itu ada tiga pembinaan yaitu bina usaha, usahaya itu dibina, bina SDA tentang bagaimana cara menangkap ikan dengan tidak memakai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan demi kelestarian ikan kita yang ada di Selat Bali, kegiatan itu disambut positif oleh nelayan, karena kegiatan itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat nelayan itu sendiri.

Jadi, awalnya tidak mengerti cara menangkap ikan dengan alat yang baik kemudian menjadi tau bagaimana menjaga lingkungan laut. Kemudian bina SDMnya ya meningkatkan gairah untuk bekerja supaya semangat, terus juga kalau SDAnyanya betul-betul mengurang maka diberikan penyuluhan alternatif pekerjaannya, seperti membuat kerupuk kerang, rencana membentuk wisata bahari, jadi aset-aset yang ada di Muncar ini bisa diangkat, ketika mengalami paceklik nelayan bisa tetap punya penghasilan. Dari kegiatan pemberdayaan itu,

menjadikan keluarganya semakin erat, jadi kita mengadakan pembinaan untuk mempertahankan budaya yang dimiliki oleh nelayan agar tidak hilang.

Banyuwangi, 19 Agustus 2019



Hasan Basri



Informan 7

Nama : Heriyanto
Usia :50 Tahun
Pekerjaan : Pengelola Brak Pasar Ikan Muncar
Alamat : Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Program Minapolitan merupakan program dari Dinas Perikanan, sebagaimana program minapolitan terkait dengan ranah tangkap dan pemasaran. Kegiatannya termasuk UMKM dibidang olahan dan memang sudah kita jalankan itu, UMKM pengolahan. Pada periode 2010 sampai 2014 pemberdayaan UMKM itu peningkatan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan UMKM itu diperuntukkan bagi yang sudah tergabung ke kelompok-kelompok, dimana membuat suatu olahan berbahan baku ikan. Pemberdayaannya itu langsung ke masyarakat, kita kan membentuk POKLAHSAR, kelompok ini dalam satu kelompok terdiri dari 10 anggota, disitu kita mengadakan suatu pembinaan-pembinaan, perbulan dilaksanakan, kita adakan perbulan pertemuan rapat, itu dari kelompok dan mengundang orang-orang dinas. Kalau kita pertemuan dalam satu bulan itu menyampaikan program-program dari dinas ke dalam kelompok. Kalau memang kita pertemuan antar kelompok mengundang orang dari Dinas itu persetiap bulan sekali pertemuannya, tapi kalau pembinaan UMKM terkait dengan program, kita kadang-kadang mengusulkan ke Dinas.

Kemudian kalau untuk pembinaan di UMKMnya kadang-kadang ada suatu pelatihan itu, semacam pelatihan-pelatihan produk, bikin nugget, bikin kerupuk bermacam-macam setiap pelatihan berganti-ganti. Jadi kalau pelatihan langsung praktek, tapi kalau perbulan itu rutinitas itu kan ada suatu pertemuan untuk supaya saling memberikan ada program dari Dinas langsung kita sampaikan kepada kelompok-kelompok yang ada yang hadir. Pelatihan itu terdiri dari beberapa kelompok, tapi masing-masing kelompok biasanya kuotanya terbatas dan mereka bergantian, jadi tidak bisa semua kelompok ikut. Kemudian, untuk modal awal itu dari pelaku UKM, banyak dari perbankan menawarkan permodalan, setiap kita adakan pertemuan itu, kadang dari perbankan baik itu BRI maupun Mandiri dan

Bank Jatim juga menawarkan permodalan itu. Kalau dari dinas itu tidak ada bantuan, yang ada itu bantuan alat membuat produknya.

Manfaat dari pemberdayaan UMKM, yang awalnya ibu-ibu nelayan itu tidak punya kegiatan hanya menunggu hasil dari suami saja yaitu bisa berkarya, katakanlah membantu si suami, selain dari pendapatan dari menelayan dia punya kegiatan untuk membuat olahan. Kadang-kadang hasil ikan dari bapaknya diolah menjadi kerupuk dan lain-lain, disamping itu menjadi pekerjaan ruinitas, tidak bergantung kepada suami. Dampak bagi pendapatnya, sangat membantu dalam perekonomian, untuk kebutuhan sehari-hari, awalnya belum mencukupi terus tercukupi, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kalau pemasar ini plaku pasar, yang menjual ikan ibu-ibu di pasar ikan, kebanyakan dari istri nelayan juga. Ada yang dapatnya dari suami dijual sendiri, cuma statusnya menjadi pedagang ikan sudah.

Banyuwangi, 4 September 2019



Heriyanto

Informan 8

Nama : Paiman
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Pak Paiman sebagai nelayan yang tergabung dalam anggota KUB Maju Sentosa yang beranggota 12 orang, KUB itu dibentuk tahun 2013. Setelah dibentuk KUB terus berapa bulan sekali mungkin satu bulan sekali baru dikasi pembinaan-pembinaan dan pelatihan. Pembinaannya itu awalnya terkait kesadaran nelayan tentang surat perijinan itu. Perijinan selesai baru mengikuti pembinaan kebersihan, kenapa mengikuti pelatihan kebersihan? Itu karena ikan lambat laun tidak tambah banyak gara-gara lingkungannya kurang jaga kebersihan. Terus mengikuti pelatihan terkait terumbu karang yang ada, dengan mengikuti pembuatan terumbu karang buatan bersama kelompok-kelompok lain. Terus setelah itu dikasi *fish market*, seperti rumah ikan bersama Dinas Perikanan Kabupaten di Pantai Satelit. Terus pelatihan terkait sampah itu bersama Dinas Lingkungan Hidup juga, ada pelatihan pembuatan jaring juga, macem-macam. Untuk keselamatan berlayar juga, pelatihan Basarnas juga dikasi terkait keselamatan berlayar.

Terkait perijinan, dulu itu Dinas Perikanan itu nggak bisa bantu nelayan, karena nelayannya juga nggak mau mengajukan permohonannya itu sendiri, intinya nelayan itu nggak mau ribet. Akhirnya kita bisa membantu dengan ketua-ketua KUB, jadi nelayan kecil itu sekarang ini sudah punya izin itu sendiri, memang gratis, kalau ngurusinya itu kadang diwakilkan ke saya, asal memenuhi persyaratan yang ada. Fasilitas perizinan sebenarnya sudah dimulai sejak lama, tapi nelayan itu sendiri kadang tidak mau ribet, akhirnya tidak terpenuhi itu. Setelah Pak Paiman masuk di kelompok itu, bersama kelompok yang lain, akhirnya sekarang ini ada 80 lebih KUB khususnya di Selatan Banyuwangi. Itu khusus nelayan GT kebawah. Manfaat diberikan fasilitas perijinan, kami ketika

berlayar di di laut utara maupun di Bali, kami tidak merasa kesulitan ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari petugas Pol Air yang ada disana, itu manfaatnya.

Pada periode taun 2010 smpai 2013 cuaca di Muncar sedang tidak baik dan sering berubah-ubah, kalau gelombang besar Pak Paiman pasti menghindar, nyari lokasi yang nggak ada ombaknya, karena kalau gelombang nebar jaring, jaringnya itu malah kampul kotoran-kotoran. Untuk lokasi pindah biasanya dikurangi jaraknya 10 mill, nggak 12 mill lagi, jaraknya dikurangi. Tetapi meskipun cuaca kurang baik harus tetap melaut. Tapi kalau cuaca ada juga pengaruhnya tapi ndak terlalu berdampak buruk, sebab nelayan kecil itu mencari ikannya disepanjang sembulungannya kan ada gunung-gunung kan berbelok-belok, kalau cuaca buruk mencari ikan itu ada teluk-teluk kecil, jadi mencarinya disitu, nggak sampai beberapa mill, jadi tetap dibibir pantai. Jadi untuk kebutuhan sehari-harialhamdulillah masih tercukupi. Beda lagi kalau perahu besar seperti Selerek dan Gardan itu sudah dilaut lepas. Kalau perahu besar kalau cuaca buruk pasti merasakan dampaknya, sebab mencarinya kan kurang lebih dari bibir pantai (Selat Bali) itu 2 mill.

Banyuwangi, 6 September 2019



Paiman

Informan 9

Nama : Riyaman
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Saya menjabat sebagai ketua KUB Rejeki Lestari mulai tahun 2012. Pada kurun waktu 2012 pas berdirinya KUB, sampai 2014 telah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, piagam dan sertifikat pelatihan yang saya dapatkan banyak. Pelatihannya itu pelatihan mesin, pelatihan *gill net*, terus pelatihan terumbu karang dan masih banyak lagi. Pelatihan mesin itu mesin dibongkar semua, diajarkan cara membongkar pasang mesin, pelatihan itu sangat bermanfaat. Kemudian diberikan perzinan juga untuk perahu, meskipun 1/2 meter ada perizinan.

Kemudian untuk cuaca pada tahun 2010 sampai 2013 memang sedang kurang baik, namun untuk dampaknya terhadap nelayan kecil tidak ada. Kalau nelayan besar ya pasti menurun, kalau nelayan kecil itu seperti saya, setiap hari datang, kerja berangkat melaut jam 3 pagi, subuh jam 8 sudah datang saya. Jadi tidak ada pengaruhnya setiap hari dapat uang, dan untuk ikan yang didapat itu didaratkan lewat TPI.

Dibangunnya *breakwater* atau tanggul itu manfaatnya lebih enak bagi nelayan, biasanya perahu nelayan itu masuk sungai sekarang enggak, jadi perahu saya ada di pelabuhan kalau melaut jalan pukul berapapun bisa, kalau dikali enggak bisa karena mengikuti pasang surutnya kalau kerja. Sebelum dibangun itu, ketika perahunya tidak bisa ke laut kan kandas itu, jadi ya terpaksa enggak bisa melaut saya. Jadi dengan dibangunnya pelabuhan itu sekarang lebih enak.

Banyuwangi, 6 September 2019

Riyaman

Informan 11

Nama : Astutik
Usia : 48 Tahun
Pekerjaan : Pengolah Petis Ikan dan Kerupuk
Alamat : Ds. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi

Saya sebagai ketua kelompok pengolah bernama “Sayu Wiwit”. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2013. Awal berdirinya itu, kan ibuk sering buat pengolahan terus sharing-sharing sama teman-teman ayok kita dari pada tidak punya program apa-apa ayok kita buat olahan apa yang bisa dipasarkan. Jadi ibu-ibu dari pada tiap hari pinjam uang di KSP harian mending kita buat usaha unuk meningkatkan hasil kita.

Pertama itu kita mengolah pepes, sebanyak 10 kg setiap hari, ada yang jual ada yang bungkus ada yang buat bumbu tapi untuk 10 orang dalam satu klompok itu. Ada yang nyetor daun, karna awalnya kan nggak punya modal, trus ibu-ibunya kan suaminya nelayan jadi yang punya ikan juga disetorkan, untuk setiap hari, air kaldunya nggak saya buang, saya buatkan petis itu, terus tulangnya itu saya jemur nanti buat makan ternak. Jadi ibu-ibu tiap bulannya menerima uang dari penghasilannya itu, lha lama-lama kita buat kerupuk cumi, kerupuk ikan. Jadi “Sayu Wiwit” ini olahannya kerupuk sama sambel petis dan ikan pepes. Jadi alasan membuat kelompok ini dari pada saya dan ibu-ibu menganggur mending berkegiatan.

Sejak didirikan kelompok belum langsung mendapat pelatihan, setelah dapat setahun baru dapat pelatihan pada tahun 2014. Pelatihan itu dari P2MKP (Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan). Penyuluhannya itu untuk semua kelompok, tapi anggota saya digilir jadi gantian. Ya alhamdulillah mbak semenjak ada bimbingan dari pihak dinas, biasanya ibu-ibu sering hutang-hutang ke KSP itu sekarang sudah enggak mbak, soalnya ada masukan dari kegiatan pengolahan, itu kan ada hasilnya. Mangkanya setiap ada pelatihan ibu-ibu disini giat.

Kegiatan pelatihan itu disuruh buat kerupuk dan olahan lain yang dari ikan-ikan itu, untuk alat dan bahannya juga sudah disediakan dari sana, jadi tinggal datang dan mengikuti pelatihannya. Untuk pelatihan kita rutin mengikuti tapi ibu-ibunya bergantian, emam itu kalau nggak ikut, nanti kalau sudah pelatihan ilmunya dibagi untuk kelompok bersama dan dipraktekkan dan berusaha untuk membuat dan dipasarkan. Untuk kegiatan pelatihan itu nggak mesti, kadang-kadang ada ya kita ikut.

Manfaat pelatihan itu sangat menguntungkan bagi saya, saya bisa menambah ilmu juga menambah perekonomian untuk ibu-ibu kan. Ilmunya itu kalau habis pelatihan kan bisa dipraktekkan dirumah, nanti hasilnya bisa dijual. Selain itu menambah mata pencaharian baru untuk saya dan ibu-ibu lain. Sebelum bentuk kelompok dulunya ibuk bingung, soalnya untuk kebutuhan sehari-hari masak ibu mau nunggu hasil dari bapak, ya bapak kalau dapat, kalau nggak dapat? Kalau ibu-ibu itu mempunyai usaha sendiri nggak mengandalkan suami, mau beli apa-apa nggak nunggu suami, pendapatan dari suami kan bisa ditabung. Jadi sebelumnya itu belum tercukupi, kalau sekarang alhamdulillah mulai saya ikut pelatihan sampai sekarang alhamdulillah ada mata pencaharian untuk saya dan ibu-ibu kelompok saya. Tanggapan saya dengan adanya pelatihan UMKM ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berlanjut.

Banyuwangi, 18 September 2019



Astutik

Informan 11

Nama : Komariah
Usia : 44 Tahun
Pekerjaan : Pengolah Kerupuk Ikan
Alamat : Ds. Tembokrejo, Kec.Muncar, Kab. Banyuwangi

Saya sebagai ketua kelompok “Bariyah”, satu kelompok anggotanya 10 orang. Waktu pertama kali saya ikut pelatihan, jadi awalnya saya itu dulu sebagai anggota, bukan ketua. Terus saya ikut pelatihan kok saya terbuka pikirannya, pertama kan saya bikin kerupuk nggak halus, terus dikasi pelatihan akhirnya punya semangat membuat kerupuk yang bagus. Modal awal usaha dari uang sendiri, kan awalnya membuat hanya sedikit. Saya goreng kerupuknya terus saya titipkan ke warung-warung.

Jadi kalau mau ikut pelatihan itu harus ada kelompok, kan awalnya saya ada kelompok, tapi nggak begitu respon ya hanya ikut-ikutan aja. Kemudian setelah mengikuti pelatihan, saya semangat membentuk kelompok sendiri, dan kalau betul-betul punya kelompok itu kan bisa mendapatkan bantuan dari dinas perikanan. Kegiatan pelatihan itu berbeda-beda, macam-macam dan berganti-ganti. Pelatihan itu nggak rutin, ya tiba-tiba ada. Setiap pelatihan tidak semua anggota diikutkan, kalau yang diminta 2 orang ya saya ngajak teman satu, bergantian, dan bergilir biar semua anggota tahu rasanya pelatihan.

Manfaat pelatihan itu ya saya senang, karena nambah ilmu, nambah pengetahuan. Yang awalnya nggak tau bikin apa-apa, bisa tau. Jadi ya memang kalau sudah pelatihan ya harus dipraktekkan, dan tentunya dapat pekerjaan baru. Sebelumnya saya nggak ada pekerjaan, hanya sebagai ibu rumah tangga saja, sekarang setelah tau cara membuat ya jadi pengolah. Kalau dampak terhadap pendapatan ya tentunya meningkat, saya jadi bisa punya penghasilan sendiri. kalau dulu hanya mengandalkan penghasilan dari suami saja.

Tanggapan saya dengan adanya pelatihan UMKM ya senang itu pasti, karena sangat bermanfaat, sangat berguna, dan nambah pengalaman juga nambah

ilmu. Terus kalau ada pelatihan di luar daerah itu kan berangkat sendiri tapi nanti pas pulang dikasi uang ganti bensin, jadi enak, semua dimudahkan.

Banyuwangi, 18 September 2019



Komariah



LAMPIRAN 6. FOTO KEGIATAN PENELITIAN

Lampran 6.1 Dokumentasi Penelitian



Gambar 6.1a *Breakwater*
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 6.1b Drainase
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 6.1c Tempat Penjemuran Ikan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 6.1d Pasar Ikan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 6.1e Tiang Listrik (Penerangan)
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 6.1f Jalan Rigid Pelabuhan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 6.1g Tempat Sampah
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Lampran 6.2 Wawancara dengan Narasumber



Gambar 6.2a Wawancara dengan Bapak Kartono Umar



Gambar 6.2b Wawancara dengan Bapak Untung Widiyanto



Gambar 6.2c Wawancara dengan Bapak Anang Budi Wasono



Gambar 6.2d Wawancara dengan Bapak Edi Widiantoro



Gambar 6.2e Wawancara dengan Ibu Indah Setyo Rini

NO	DATA	2008 (UNIT)	2009 (UNIT)	2010 (UNIT)	2011 (UNIT)	2012 (UNIT)	2013 (UNIT)	2014 (UNIT)
1	Nelayan (orang)	12,257	13,330	13,360	13,186	13,123	13,143	13,203
2	Armada							
	a. Kapal Motor							
	- 5 GT	567	568	566	566	548	548	553
	- 5 GT -10 GT	317	316	319	322	315	319	299
	-10 GT -30 GT	190	190	189	189	205	189	197
	> 30 GT	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perahu Motor Tempel	954	676	676	686	680	671	656
	c. Perahu Tanpa Motor	96	121	121	111	118	108	78
	JUMLAH	2,124	1,871	1,871	1,874	1,866	1,835	1,783
3	Alat Penangkap Ikan							
	Purse Saine (pukat cincin)	185	203	203	203	207	203	190
	Payang (pukat kantong)	44	42	42	42	42	62	62
	Gill Net (jaring insang)	1,053	907	907	682	679	674	624
	Lift Net (jaring angkat)	129	120	120	276	276	280	280
	Hook and Line (pancing)	1,018	628	628	645	642	657	655
	Traps (perangkap)	142	224	224	282	282	287	280
	JUMLAH	2,571	2,124	2,124	2,130	2,128	2,163	2,091
4	Bakul/ Pedagang	109	111	102	65	84	70	75
5	Pengolah							
	Pengalengan ikan	8	8	8	12	12	12	12
	Cold Storage	30	30	30	41	41	41	41
	Penepungan mekanik	34	39	39	36	36	36	36
	Pabrik es	5	5	5	7	7	7	7
	Pengasin	53	24	24	52	47	45	45
	Terasi	4	4	4	1	1	1	1
	Petis	6	6	6	6	6	6	6
	Pemindangan	22	23	23	30	30	30	30
	Penepungan tradisional	18	13	13	13	13	13	13
	Minyak ikan	11	11	11	14	14	14	14
	Ikan beku	26	26	26	26	26	26	26
	Ubur-ubur	5	5	5	5	5	5	5
	Budidaya Lobster	4	4	4	4	4	4	4
	Budidaya Mutiara	1	1	1	1	1	1	1
	Exportir	17	17	17	17	17	17	17
	JUMLAH	244	216	216	265	260	258	258
6	Produksi Ikan (KG)	35.756.636	32.782.997	22.046.289	16.526.715	11.459.005	8.010.771	11.792.713
	Nilai Produksi (Rp)	112.724.026.500	82.090.947.000	98.394.406.500	84.956.896.500	107.374.808.500	87.546.170.500	118.662.351.000

Gambar 6.3b Data UPT. P2SKP Muncar
(Sumber: Laporan Tahunan UPT. P2SKP Muncar)

Lampran 6.4 Matrik Program Tahunan Kegiatan Minapolitan



Tabel 7.1 Matrik Program Tahunan Kegiatan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 sampai Tahun 2014

Tahun	KELOMPOK KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR KERJA	Volume	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp.)	INSTANSI / SKPD TERKAIT
Tahun 2012	INFRASTRUKTUR	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur, di Wilayah Kerja operasional Pelabuhan : Tanggul, Irigasi, Relokasi Pemukiman (Sosialisasi/Pengadaan tanah), Drainase, Penerangan (pemukiman), Drainase (Pemukiman)	Tersedianya infrastruktur Pelabuhan Perikanan ; tanggul, fasilitas pendidikan (BLK, SMK Kelautan), Pemukiman, Drainase pemukiman, Penerangan Pemukiman		6,300,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur ; fasilitas pendidikan (BLK, SMK Kelautan)	Tersedianya infrastruktur peningkatan kualitas SDM ; fasilitas pendidikan (BLK, SMK Kelautan)		50,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Peningkatan Pelabuhan Perikanan (Grajakan)	Terealisasinya Peningkatan sarana Pelabuhan Perikanan		5,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi

175



		Pembangunan Jalan	Terealisasinya pembangunan jalan masuk ke lokasi perwakilan PPM	1 paket	1,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Peningkatan Pelabuhan Perikanan (Pancer)	Terealisasinya Peningkatan sarana Pelabuhan Perikanan		5,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Pembangunan dan peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dikawasan Wilayah operasional pelabuhan perikanan	Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Pelabuhan Perikanan		100,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Sub Total			17,450,000	
	KEGIATAN PERIKANAN	Operasi penertiban dan pengawasan perairan serta pembinaan thd nelayan	Terealisasinya ketertiban perairan dan masyarakat nelayan	1 paket	150,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Penanaman mangrove	Terealisasinya penanaman mangrove	1 paket	50,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi

176

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



	Restocking SDI	Terealisasinya SDI ikan yang meningkat	1 paket	50,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Pengadaan Alat Penangkap Ikan : Jukung dan alat tangkap	Terealisasinya jukung dan alat penangkapan ikan	60 paket	150,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Pengadaan rumpun laut dangkal	Terealisasinya rumpun laut dangkal	100 unit	300,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Pengadaan Sarana TPI : timbangan	Terealisasinya pengadaan timbangan untuk TPI	24 unit	500,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Peningkatan SDM (Pemberdayaan Nelayan, Koperasi dan UMKM)	Terselenggaranya peningkatan sumberdaya manusia yang handal		200,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
Sub Total				1,400,000	

177

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



TAHUN	KELOMPOK KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR KERJA	Volume	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp.)	INSTANSI/SKPD TERKAIT
Tahun 2013	INFRASTRUKTUR	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur, di Wilayah Kerja operasional Pelabuhan : Tanggul, Irigasi, Mitigasi bencana, Drainase, Penerangan (pemukiman), Drainase (Pemukiman)	Tersedianya infrastruktur Pelabuhan Perikanan ; tanggul, irigasi, Mitigasi bencana, Drainase pemukiman, Penerangan Pemukiman		4,300,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur ; fasilitas pendidikan (BLK, SMK Kelautan)	Tersedianya infrastruktur peningkatan kualitas SDM ; fasilitas pendidikan (BLK, SMK Kelautan)		100,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Peningkatan Pelabuhan Perikanan (Grajakan)	Terealisasinya Peningkatan sarana Pelabuhan Perikanan		5,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi

178

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



KEGIATAN PERIKANAN	Pembangunan Jalan	Terealisasinya pembangunan jalan masuk ke lokasi perwakilan PPM	1 paket	1,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Peningkatan Pelabuhan Perikanan (Pancer)	Terealisasinya Peningkatan sarana Pelabuhan Perikanan		5,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Pembangunan dan peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dikawasan Wilayah operasional pelabuhan perikanan	Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Pelabuhan Perikanan		100,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Operasi penertiban dan pengawasan perairan serta pembinaan thd nelayan	Terealisasinya ketertiban perairan dan masyarakat nelayan	Sub Total 1 paket	15,500,000 150,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi

179

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



	Penanaman mangrove	Terealisasinya penanaman mangrove	1 paket	50,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Restocking SDI	Terealisasinya SDI ikan yang meningkat	1 paket	50,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Pengadaan Alat Penangkap Ikan : Jukung dan alat tangkap	Terealisasinya jukung dan alat penangkapan ikan	60 paket	200,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Pengadaan rumpon laut dangkal	Terealisasinya rumpon laut dangkal	100 unit	300,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Pengadaan Sarana TPI : timbangan	Terealisasinya pengadaan timbangan untuk TPI	24 unit	500,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Peningkatan SDM (Pemberdayaan Nelayan, Koperasi dan UMKM)	Terselenggaranya peningkatan sumberdaya manusia yang handal		200,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
	Sub Total			1,450,000	

180


 PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN	KELOMPOK KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR KERJA	Volume	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp.)	INSTANSI/SKPD TERKAIT
Tahun 2014	INFRASTRUKTUR	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur, di Wilayah Kerja operasional Pelabuhan : Tanggul, Irigasi, Drainase, Penerangan (pemukiman), Drainase (Pemukiman)	Tersedianya infrastruktur Pelabuhan Perikanan ; tanggul, Irigasi, Drainase pemukiman, Penerangan Pemukiman		4,800,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur ; fasilitas pendidikan (BLK, SMK Kelautan)	Tersedianya infrastruktur peningkatan kualitas SDM ; fasilitas pendidikan (BLK, SMK Kelautan)		100,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Peningkatan Pelabuhan Perikanan (Grajakan)	Terealisasinya Peningkatan sarana Pelabuhan Perikanan		5,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi

181


 PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI

		Peningkatan Pelabuhan Perikanan (Pancer)	Terealisasinya Peningkatan sarana Pelabuhan Perikanan		5,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Pembangunan dan peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dikawasan Wilayah operasional pelabuhan perikanan	Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Pelabuhan Perikanan		100,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Sub Total			15,000,000	
	KEGIATAN PERIKANAN	Operasi penertiban dan pengawasan perairan serta pembinaan thd nelayan	Terealisasinya ketertiban perairan dan masyarakat nelayan	1 paket	150,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
		Penanaman mangrove	Terealisasinya penanaman mangrove	1 paket	50,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi

182

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Restocking SDI	Terealisasinya SDI ikan yang meningkat	1 paket	50,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
Pengadaan Alat Penangkap Ikan : Jukung dan alat tangkap	Terealisasinya jukung dan alat penangkapan ikan	60 paket	150,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
Pengadaan Sarana TPI : timbangan	Terealisasinya pengadaan timbangan untuk TPI	24 unit	500,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
Peningkatan SDM (Pemberdayaan Nelayan, Koperasi dan UMKM)	Terselenggaranya peningkatan sumberdaya manusia yang handal		200,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Banyuwangi
Sub Total			1,100,000	

183

LAMPIRAN 7. SURAT KEPUTUSAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/ 852 /KEP/429.011/2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI MINAPOLITAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan;
- b. bahwa guna pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, maka perlu menetapkan wilayah kecamatan sebagai kawasan Minapolitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

9. *Undana-undana.....*

3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- Pertama** : Penetapan Lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi.
- Kedua** : Lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama terletak di Kecamatan Muncar.
- Ketiga** : Lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, mempunyai 2 (dua) zona pendukung, yaitu :
1. Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Pesanggaran sebagai Zona Sentra Produksi.
 2. Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono dan Kecamatan Tegaldlimo sebagai Zona Penyangga.
- Keempat** : Pengembangan Lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi, Zona Sentra Produksi dan Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dan Ketiga dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- Kelima** : Peta Lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terlampir.
- Keenam** : Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- Ketujuh** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Agustus 2010

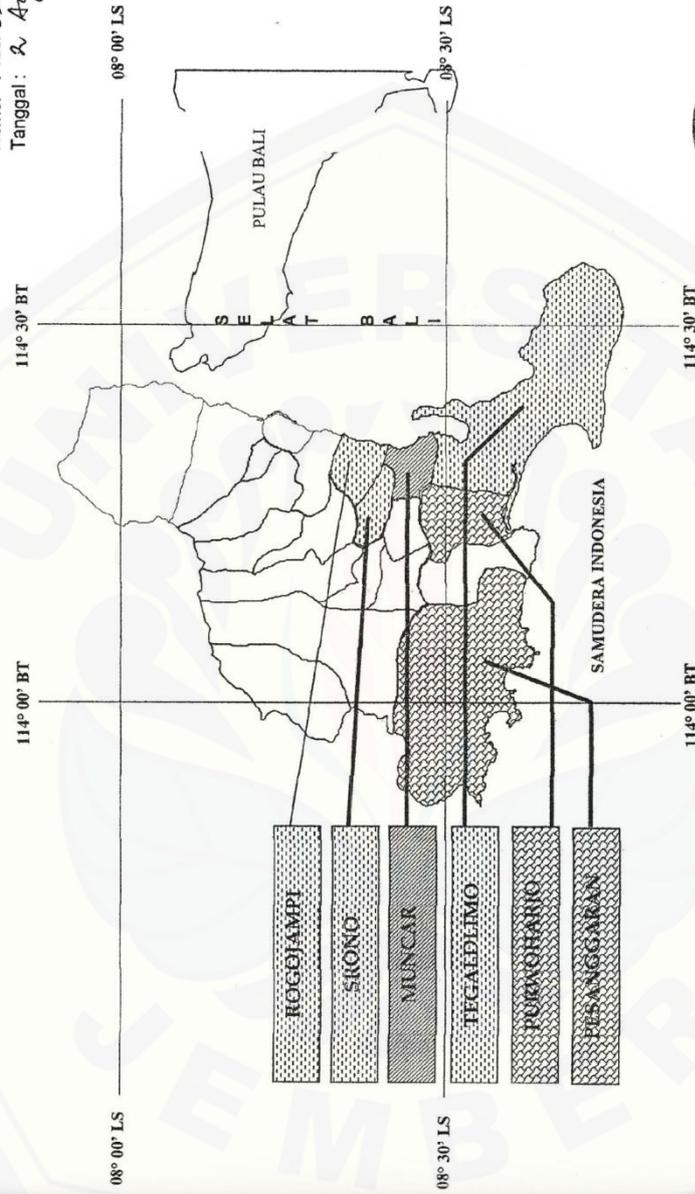


Banyuwangi.

MEMUTUSKAN.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
Nomor : 188/ 852/KEP/429.01/121
Tanggal : 2 Agustus 2011

PETA LOKASI MINAPOLITAN DI KABUPATEN BANYUWANGI



LAMPIRAN 8. SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: (0331)- 330224, 334267, 337422, 333147 * Faximile: 0331-339029
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor **4755/UN25.1.5/LT/2019** **28 MAY 2019**
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
2. Dinas Perikanan Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
3. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar
4. Kantor Kecamatan Muncar
5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini:

Nama : Ajeng Nungky Cendry
NIM : 150210302039
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Berkenaan dengan penyelesaian studinya, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di instansi yang saudara pimpin dengan judul "Program Minapolitan dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015". Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Prof. Dr. Suratno, M.Si.
NIP. 196706251992031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
 Telepon (0333) 412343 Faks (0333) 412343
 email : dpmptsp@banyuwangikab.go.id website : www.dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 17 Juni 2019

Kepada :

Nomor : 072/ 543 /REKOM/429.113/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Pengantar
 Penelitian/Survey/Research**

Yth. Sdr

1. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
2. Kepala UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
3. Camat Muncar
4. Kepala Badan Pusat Statistik

Kab. Banyuwangi
 di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Jember
 Tanggal : 28 Mei 2019
 Nomor : 4755/UN25.1.5/LT/2019

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Pengantar Penelitian kepada :

Nama : Ajeng Nungky Cendry
 NIM : 150210302039
 Program Studi : Pendidikan Sejarah
 Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Survey/Research:

Judul : Program Minapolitan dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015

Tempat : Dinas Perikanan dan Pangan, UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Kecamatan Muncar dan BPS Kab. Banyuwangi

Waktu : 18 Juni s/d 31 Juli 2019

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Sekretaris


NUR AGUS SUHARTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660804 199403 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR
Jalan Hayam Wuruk Nomor : 14 Telephon Nomor: (0333) 593008
MUNCAR
www.banyuwangikab.go.id e_mail : kec_muncar@banyuwangikab.go.id

Muncar, 12 April 2019

Nomor : 072/ 515 /429.511/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI PENELITIAN**

Kepada
Yth.Sdr. 1. Kepala UPT. Pelabuhan dan
Pengelolaan Kec. Muncar
2. Kepala Desa Kedungrejo

di-

MUNCAR

Menunjuk surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Juni 2019 Nomor: 072/543/REKOM/429.113/2018 perihal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan :

Nama : AJENG NUNGKY CENDRY
NIM. 150210302039

Bermaksud melaksanakan Penelitian/Survey/Research tentang :
"Program Minapolitan dan Damkanya Terhadap Kondisi Social Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015"

Tempat : Dinas Perikanan dan Pangan, UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan Sumberdaya kelautan, Desa kedungrejo
Kecamatan Muncar dan BPS Banyuwangi.

Tanggal : 18 Juni 2019 s/d 31 Juli 2019

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon bantuan saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/ keterangan yang diperlukan dengan ketentuan kepada peserta :

1. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Instansi
2. Menjaga situasi dan Kondisi selalu Kondusif
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Kantor Kecamatan Muncar

Demikian untuk menjadi maklum .



Drs. LUKMAN HAKIM S, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196703211995031001